



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Penanggulangan Kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 telah menetapkan arah kebijakan, strategi, mekanisme pelaksanaan serta sistem evaluasi dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.
6. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RAT Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

7. Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut LP2KD adalah laporan yang disusun TKPKD setiap tahunnya sebagai sarana monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.
8. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
9. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 merupakan dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Pasal 3

RAT Penanggulangan Kemiskinan tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2026.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
 - BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 - BAB IV RENCANA AKSI TAHUN 2026
 - BAB V PENUTUP

- (2) Uraian RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan dilakukan dengan menyusun LP2KD tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi hasil pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menyusun Laporan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 8 Januari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 8 Januari 2026
Nomor : 3 Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu *end goals* dari 17 tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs). Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara, maka “penghapusan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, Tujuan 1 TPB/SDGs menargetkan tidak ada lagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (pengeluaran per kapita kurang dari US\$1.25/hari PPP). Selain itu, tujuan tersebut juga menargetkan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi serta menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidak berdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagaimana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Akselerasi program lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan mutlak diperlukan, mulai dari reformasi perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan. Masalah kemiskinan harus dilihat dalam kerangka multidimensi, mengingat kemiskinan bukan hanya terkait pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal, seperti kerentanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin serta pemenuhan hak dasar masyarakat. Kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi.

Kendatipun demikian, untuk memastikan indikator-indikator yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap dinamika kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan telah ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana intervensi dan anggaran setiap tahunnya serta memperhatikan dinamika sasaran penerima program untuk peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran dan pemenuhan lingkungan yang layak maka Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPKD mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Kabupaten Situbondo melalui dokumen rencana aksi tahunan (RAT).

Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk menyinergikan peran pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) dan nonpemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Penyusunan dokumen dengan berbasis pada data dan informasi yang valid diharapkan dapat meminimalisir deviasi kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 HASIL CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu tujuan yang masuk kedalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's) yang memiliki sejumlah 17 tujuan. Masalah kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara hingga tahun 2030 yang menjadi target akhir agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari dalam SDG's, dan berada di tujuan nomor 1 yaitu "Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun". Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target pada Tujuan 1 TPB/SDG's dilihat dari capaian masing-masing indikator yang kemudian disandingkan dengan target sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sesuai dengan hasil capaian tujuan 1 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Situbondo, diperoleh hasil beberapa indikator ditahun 2023 dan 2024 yang kemudian disandingkan dengan target, sehingga dihasilkan gap indikator. Adapun hasil capaian Tujuan 1 di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Hasil Capaian Tujuan 1 Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Situbondo**

No. Indika- tor	Indikator	Target (Perpres 59/2017)	Capaian 2023	Capaian 2024	Gap
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11,90%	11,51%	10,94%
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95,00%	86,14%	95,67%	0,67%
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Jml TK 2019 = 129.366.192, sehingga kepesertaan 50,94%)	12,45%	12,73%	38,49%
1.3.1(c)	Persentase penyandang	17,12%	0,20%	NA	16,92%

No. Indika-tor	Indikator	Target (Perpres 59/2017)	Capaian 2023	Capaian 2024	Gap
	disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.				
1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta (Rata-rata 5.447 per Kab./ Kota atau penurunan 1,67% per tahun)	34.519	32361	20.072
1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70%	96,00%	76,8%	6,8%
1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	85,76%	83,6%	20,6%
1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	75,30%	70,7%	5,7%
1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	100,00%	82,55%	83,80%	16,20%
1.4.1(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100,00%	70,50%	79,21%	20,79%
1.4.1(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.				-
1.4.1(g)	Angka Partisipasi	94,78%	85,19%	92,61 %	2,17%

No. Indika- tor	Indikator	Target (Perpres 59/2017)	Capaian 2023	Capaian 2024	Gap
	Murni (APM) SD/MI/ sederajat.				
1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	82,20%	91,15%	94,78 %	12,58%
1.4.1(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77,40%	96,00%	96,72%	19,32%
1.4.1(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100%	100%	100%	0
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,438	6112,04	6111
1.5.1(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39 Daerah	5	5	0
1.5.1(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	151 Ribu	N/A		-
1.5.1(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	81,5 Ribu	N/A		-
1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	N/A	N/A	-
1.5.1(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	94,11	151,65	33,05%
1.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Rp2.491 .600.00 0,00	Rp3,197 ,450,00 0.00	Rp705.8 50.000
1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko	Ada	2	1	0

No. Indika-tor	Indikator	Target (Perpres 59/2017)	Capaian 2023	Capaian 2024	Gap
	bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.				
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	N/A	223.310 .225.57 7	0
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	50,84%	47,19%	3,65%

Sumber : Diolah, 2025

Tabel capaian beberapa indikator SDG's pada tujuan 1 (Penanggulangan Kemiskinan) diatas, capaian tahun 2024 kemudian disandingkan dengan target yang telah ditetapkan di Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sehingga diperoleh gap pada setiap indikator di tujuan 1. Gap antara target dengan hasil capaian 2024 pada indikator diatas, terdapat beberapa yang telah mencapai target maupun yang kurang dari target yang ditetapkan.

2.2 HASIL EVALUASI PROGRAM KEMISKINAN, CAPAIAN 2024 (ANGGARAN DAN KINERJA)

Capaian 2024 menilai anggaran dan kinerja. Evaluasi ini bertujuan memastikan efektivitas belanja publik dalam menurunkan kemiskinan dengan membaca dua sisi sekaligus dengan serapan anggaran sebagai input finansial yang menggambarkan kapasitas penyerapan dan disiplin pelaksanaan dan kinerja indikator sebagai keluaran atau hasil yang mengisyaratkan seberapa jauh intervensi benar-benar mencapai sasaran. Karena indikator kinerja berasal dari berbagai program dengan satuan yang beragam, penilaiannya menitikberatkan pada tingkat pencapaian (%) terhadap target tahunan. Sementara itu, efektivitas anggaran dibaca melalui tingkat realisasi dan misalignment jika ada misalnya kinerja tinggi tetapi serapan rendah dengan potensi target terlalu konservatif atau serapan tinggi tetapi kinerja tertinggal dengan risiko inefisiensi. Dengan kerangka ini, evaluasi bukan hanya menilai kepatuhan penyerapan, melainkan juga konsistensi *input-output* untuk dasar perbaikan dalam RAT tahun berikutnya.

Tabel 2. 2 Tabel Kinerja Hasil Evaluasi Program Kemiskinan Capaian Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	Dinas
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi	%	150	150	100	Bapperida
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang menerima layanan pemulihan Disfungsi Sosial	%	287	316	110	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data yang tervalidasi	%	136	136	100	
Program Penanganan Bencana	Jumlah Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	%	196	100	51	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan	%	105	105	100	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase destana	%	100	100	100	BPBD
	Persentase respon cepat darurat bencana kurang dari 24 jam	%	100	100	100	
	Persentase rekomendasi pemulihan pasca bencana	%	100	100	100	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja	%	100	100	100	Disnaker
	Persentase pencari kerja masyarakat miskin yang mendapat pelatihan	%	100	100	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	Dinas
	berbasis kompetensi sesuai pasar kerja					
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja bagi masyarakat	%	100	67,24	67,24	
	Persentase penempatan tenaga kerja bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	
	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	%	100	100	100	
	Persentase tenaga kerja masyarakat miskin yang berwirausaha	%	100	41.17	41.17	
Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	%	100	94,28	94,28	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase calon transmigrasi yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi	%	100	97	97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi	%	150	150	100	
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang menerima layanan pemulihan disfungsi sosial		287	316		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data yang tervalidasi	%	136	136		
	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan dasarnya		26.62	26.62		
Program Penanganan	Jumlah penanganan		196	100		

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	Dinas
Bencana	bencana alam dan bencana sosial					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan	%	105	105	100	
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah lembaga SD yang mendapatkan bantuan peningkatan mutu dan infrastruktur	Lembaga	15	15	100	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio murid terhadap guru SD/MI	%	9.65	11.04	114	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks keselamatan lalu lintas		60.73	114.08	187.84	Dishub
	Presentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart	%	43.14	43.14	100	
	Presentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum sesuai standar	%	47.06	82.35	174.98	
Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	%	4.75	34.60		Dinas Perpusip
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan	%	105	105	100	Dispendukcapil
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu	%	100	100	100	DPMD

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	Dinas
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat					
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga pemerintahan yang melaksanakan PUG	lembaga	44	44	100	DPPPAKB
	Persentase usaha perempuan mandiri	%	54	52	96	
	Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	lembaga	44	44	100	
	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen	%	33,2	28,89	87	
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	28,2	27,63	98	
	Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya	kepala keluarga	35	35	100	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA	orang	8	11	138	Diskominfo
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peningkatan angka usia kawin pertama	%	21	18,89	90	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase kualitas informasi publik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Statistik yang valid (Data sektoral dan data wilayah)	%	100	100	100	
Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase pelaksanaan pembinaan/pelat	%	67	58	86.57	Disporapar

PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	TARG ET 2024	REALIS ASI 2024	%	Dinas
Saing Kepemudaan	ihan kepemudaaan					
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	83	75	90.36 %	
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	100	100	100	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase daerah rawan pangan yang tertangani jumlah jenis penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota yang ditangani	%	100	100	100	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian yang termanfaatkan	%	100	100	100	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang termanfaatkan	%	100	100	100	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase bencana pertanian tertangani dan terkendali	%	100	100	100	
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis	%	100	100	100	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber: Bapperida Kabupaten Situbondo, 2025

Rata-rata capaian berada di sekitar 100,81% dengan median 100%, di mana 31 indikator sudah $\geq 100\%$ yang berarti tercapai/terlampau, 5 indikator berada pada $90 - < 100\%$ (hampir tercapai), dan 5 indikator berada

<90%; khususnya terdapat 2 indikator <60% yang perlu menjadi prioritas perbaikan. Hasil ini menggambarkan distribusi capaian yang positif secara agregat, namun keberadaan indikator yang terlampaui hingga $\geq 120\%$ mengindikasikan target setting yang cenderung konservatif pada sebagian item, sementara beberapa indikator tertinggal menunjukkan bottleneck implementasi atau desain intervensi yang kurang tepat sasaran. Agar pembacaan lebih tajam, indikator yang *over-achieve* perlu diaudit untuk memastikan kualitas keluaran (bukan sekadar kuantitas atau efek *carry-over*, sedangkan indikator *under-achieve* diberi rencana remedial yang spesifik (misalnya penyesuaian mekanisme penyaluran, penguatan job-matching pelatihan, atau dukungan pendampingan intensif bagi sasaran sulit). Implikasi ke RAT 2025, dengan menetapkan target yang menantang namun kredibel (berbasis historical baseline + kapasitas implementasi), grooming indikator yang heterogen satuannya menjadi cluster prioritas (serapan kerja, pendapatan/omzet UMKM rentan, dan graduasi KPM), dan pasangkan setiap indikator dengan intervensi berbiaya dominan yang benar-benar mendorong pencapaiannya agar input (anggaran) dan output (kinerja) berjalan selaras.

Tabel 2. 3 Tabel Anggaran Hasil Evaluasi Program Kemiskinan Capaian Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Dinas
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang menerima layanan pemulihan Disfungsi Sosial	Rp50.000.000	Rp43.621.100	87,24%	Dinas Sosial
Program Penanggulangan Bencana	Persentase destana	Rp50.000.000	Rp40.473.100	80,95%	BPBD
	Persentase respon cepat darurat bencana kurang dari 24 jam	Rp120.000.000	Rp118.510.000	98,76%	
	Persentase rekomendasi pemulihan pasca bencana	Rp200.000.000	Rp178.660.000	89,33%	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	Rp1.362.500.000	Rp937.362.133	68,80%	Disnaker
	Persentase Pencari Kerja masyarakat miskin yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja				
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan tenaga kerja bagi Masyarakat	Rp1.260.000.000	Rp414.067.043	32,86%	
	Persentase Penempatan tenaga Kerja bagi Masyarakat Miskin				
	Persentase Tenaga Kerja yang Berwirausaha				

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Dinas
	Persentase Tenaga Kerja masyarakat miskin yang Berwirausaha				
Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	Rp482.500.000	Rp280.878.703	58,21%	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Calon Transmigrasi yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi	Rp55.000.000	Rp53.137.800	96,61%	
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Lembaga SD yang mendapatkan Bantuan Peningkatan Mutu dan Infrastruktur	Rp69.403.906.425	Rp67.656.474.524	97,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	Rp17.391.200.000	Rp17.391.200.000	100%	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Rp35.829.114.833	Rp27.253.847.200	76,07%	Dinas Perhubungan
	Presentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart				
	Presentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum sesuai standart				
Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Rp345.475.600	Rp340.593.125	98%	Dinas Perpustakaan

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Dinas
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi	Rp200.000.000	Rp63.018.100	32%	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan	Rp1.135.076.424	Rp1.110.899.611	97,87%	DPMD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat				
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga pemerintahan yang melaksanakan PUG	Rp656.891.604	Rp608.143.180	92,58%	DP3AP2KB
	Persentase usaha perempuan mandiri				
	Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG				
	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen				
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan				
	Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya				

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Dinas
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA	Rp2.980.000	Rp2.200.000	73,83%	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peningkatan angka usia kawin pertama	Rp1.745.700.000	Rp1.745.700.000	100%	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kualitas Informasi Publik	Rp1.529.286.100	Rp1.493.811.921	97,68%	Diskominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan data Wilayah)	Rp223.754.400	Rp191.743.936	85,69%	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	Rp485.000.000	Rp470.561.500	97,02%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Rp220.000.000	Rp214.090.350	97,31%	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita	Rp225.842.500	Rp153.009.100	67,75%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Daerah Rawan Pangan Yang Tertangani jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Ditangani	Rp15.674.000	Rp14.710.700	93,85%	

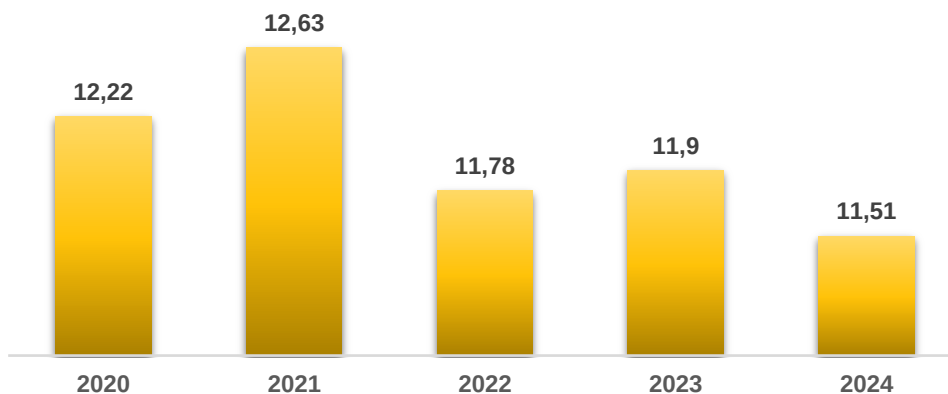
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Dinas
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan	Rp55.916.517	Rp45.461.600	81,30%	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian Yang Termanfaatkan	Rp20.641.000.000	Rp6.994.041.854	33,88%	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Bencana Pertanian Tertangani Dan Terkendali	Rp7.234.380.505	Rp6.721.021.542	92,90%	
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis	Rp210.287.500	Rp144.253.850	68,60%	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Rp430.000.000	Rp318.225.420	74,01%	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengembangan UMKM		Rp510.000.000	Rp364.786.850	71,53%	Diskoperindag
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Rp425.465.900	Rp272.727.300	64,10%	
Progran Perencanaan Pengembangan Industri		Rp4.677.119.992	Rp3.240.358.437	69,28%	
TOTAL		Rp166.628.596.700	Rp138.473.978.754	83,10%	

Sumber: Bapperida Kabupaten Situbondo, 2025

Total target belanja program kemiskinan tahun 2024 tercatat sekitar Rp166,62 miliar dengan realisasi sebesar Rp138,47 miliar, sehingga tingkat serapan agregat mencapai 83,10%. Nilai ini menandakan pelaksanaan yang relatif baik, namun masih menyisakan ruang perbaikan pada seperlima porsi anggaran yang belum terealisasi. Pada tataran manajerial, serapan 83% perlu ditelusuri penyebabnya apakah karena front-loading yang terlambat, kendala persyaratan administratif pada bantuan langsung/hibah, atau desain kegiatan yang baru mengemuka di paruh akhir tahun sehingga waktu realisasi tidak cukup. Untuk menjaga line of sight ke hasil, perlu dipastikan bahwa porsi anggaran yang terserap betul-betul menggerakkan indikator outcome/output kunci (misalnya graduasi KPM, serapan kerja pascapelatihan, atau naik kelas UMKM) dan bukan hanya biaya proses. Implikasi ke RAT 2025, dengan mempercepat penetapan paket kegiatan dan procurement, gunakan mekanisme pembayaran berbasis kinerja, serta lakukan realokasi intra-tahun dari komponen yang under-spend ke kegiatan yang terbukti berkontribusi langsung pada indikator utama.

2.3 KONDISI UMUM KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO

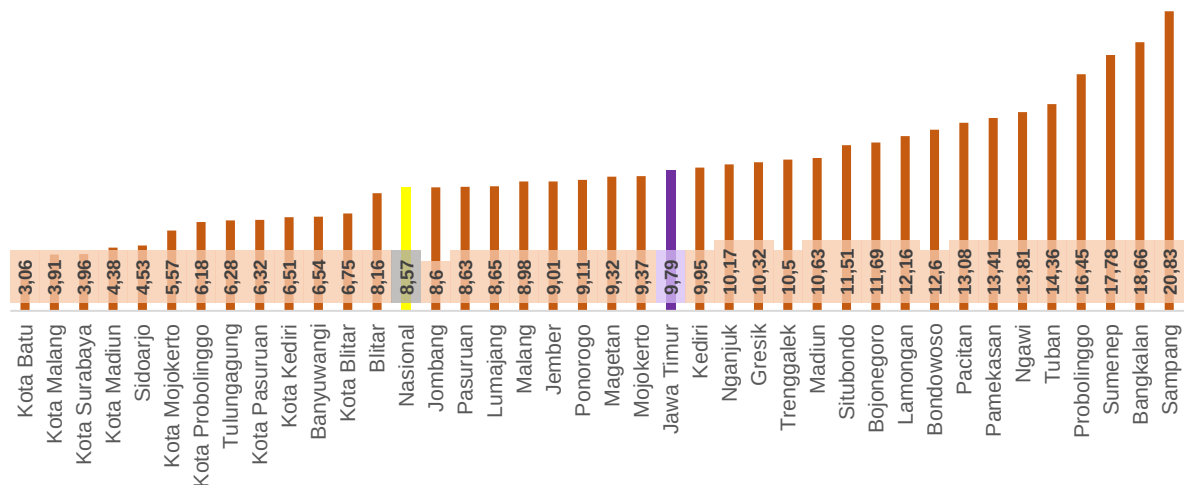
Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan akses sosial-ekonomi secara layak. Kemiskinan tidak hanya berarti kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam akses terhadap peluang, sumber daya, dan layanan publik. Maka perlunya Indikator persentase penduduk miskin yang merupakan alat penting dalam menilai tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan menyesuaikan strategi yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Situbondo tren penduduk miskin ditahun 2020-2024 dapat antara lain yaitu:



Gambar 2. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Sesuai dengan gambar grafik diatas, penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dari tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif, cenderung mengalami penurunan. Meskipun ditahun 2021, penduduk miskin memiliki nilai sebesar 12,63% yang merupakan nilai paling tinggi dalam lima tahun terakhir, namun ditahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,51%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Serta Program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja menjadi faktor kunci dalam tren penurunan persentase penduduk miskin ini.



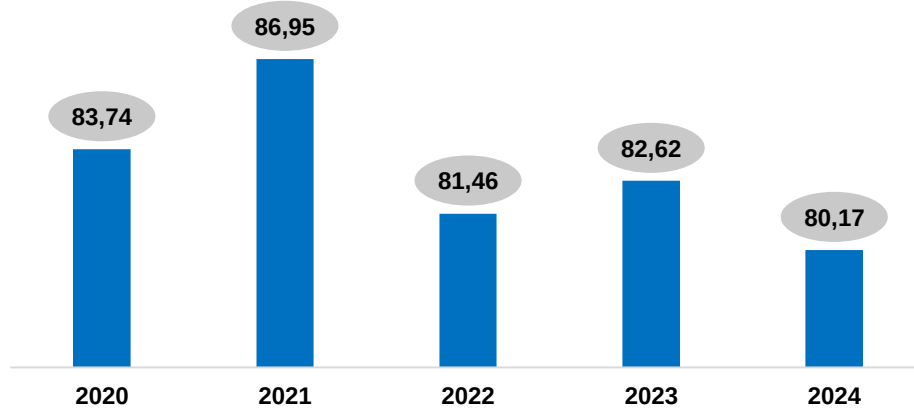
Gambar 2. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo tahun 2024 menjadi sebesar 11,51%, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur dan nasional masih tergolong pada kategori tinggi. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian sebesar 9,79% dan Nasional yang memiliki capaian sebesar 8,57%, maka kemiskinan di Kabupaten Situbondo masih memerlukan upaya yang lebih untuk menurunkan persentase penduduk miskin tersebut. Dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi dan inovatif untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta penguatan program-program pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di masa mendatang.

Disisi lain dari adanya persentase penduduk miskin, Jumlah penduduk miskin juga merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Maka, Penduduk miskin di Kabupaten Situbondo adalah penduduk yang

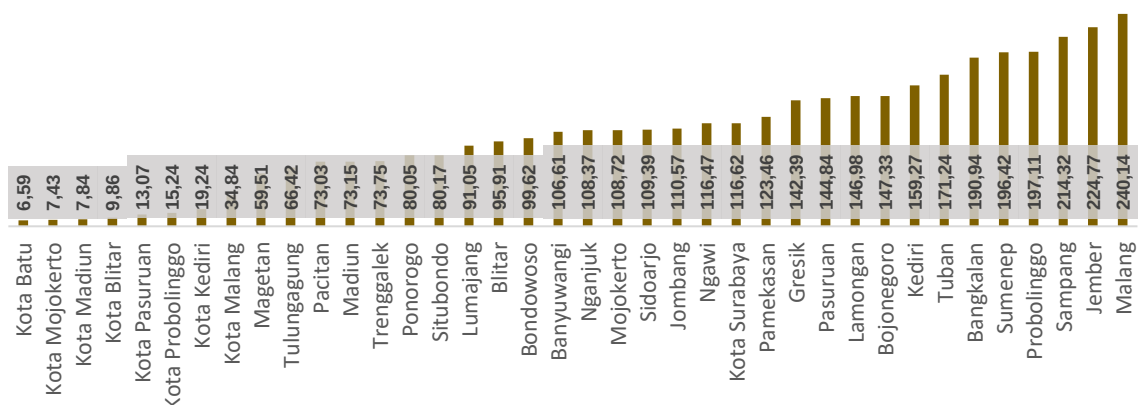
tinggal di wilayah administratif Kabupaten Situbondo dan memiliki pengeluaran per kapita per bulan lebih rendah dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS untuk wilayah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten Situbondo

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024, memiliki tren dengan kecenderungan menurun. Tren tersebut paling tinggi ada ditahun 2021 yakni sebesar 86,95 yang kemudian mengalami penurunan hingga ditahun 2020 menjadi 80,17. Penurunan ini mencerminkan adanya progres dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, yang didukung oleh program-program pemerintah dan kebijakan lokal yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo masih tergolong besar karena berada di angka 80-an. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kota lainnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo berada di posisi ke-24 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

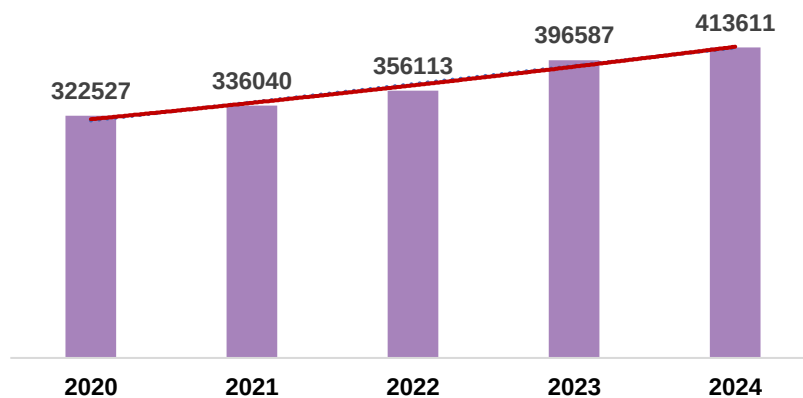


Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan, hingga mencapai 80.17 ribu jiwa pada tahun 2024, Posisi ini tepat berada di bawah Kabupaten Lumajang dan di atas Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa kemiskinan di Situbondo masih menjadi tantangan yang memerlukan fokus kedalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Maka perlu upaya intensif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Situbondo agar penurunan jumlah penduduk miskin dapat lebih cepat dan sejalan dengan target-target pembangunan sosial-ekonomi.

Selain jumlah penduduk miskin yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, Garis Kemiskinan juga diperhatikan untuk proses pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pendapatan yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, papan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan menganalisis garis kemiskinan, pemerintah dapat lebih akurat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada di bawah atau di sekitar batas ini, sehingga strategi dan intervensi yang tepat dapat disusun. Di Kabupaten Situbondo, garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:



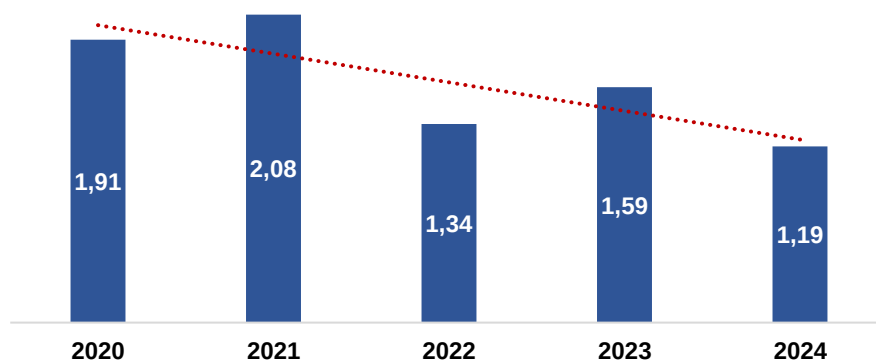
Gambar 2. 5 Garis Kemiskinan di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Tren garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Di awal tahun 2020 memiliki capaian sebesar 322.527 yang setiap tahun meningkat hingga ditahun 2024 menjadi 413.611. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan biaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat, yang mengharuskan penyesuaian secara terus menerus untuk menentukan intervensi kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Situbondo.

Selain itu, untuk menggambarkan rata-rata kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan, menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur rata-rata jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks ini, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami, karena pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Konsep ini dikembangkan agar pengukuran kemiskinan tidak hanya berhenti pada angka proporsi penduduk miskin,

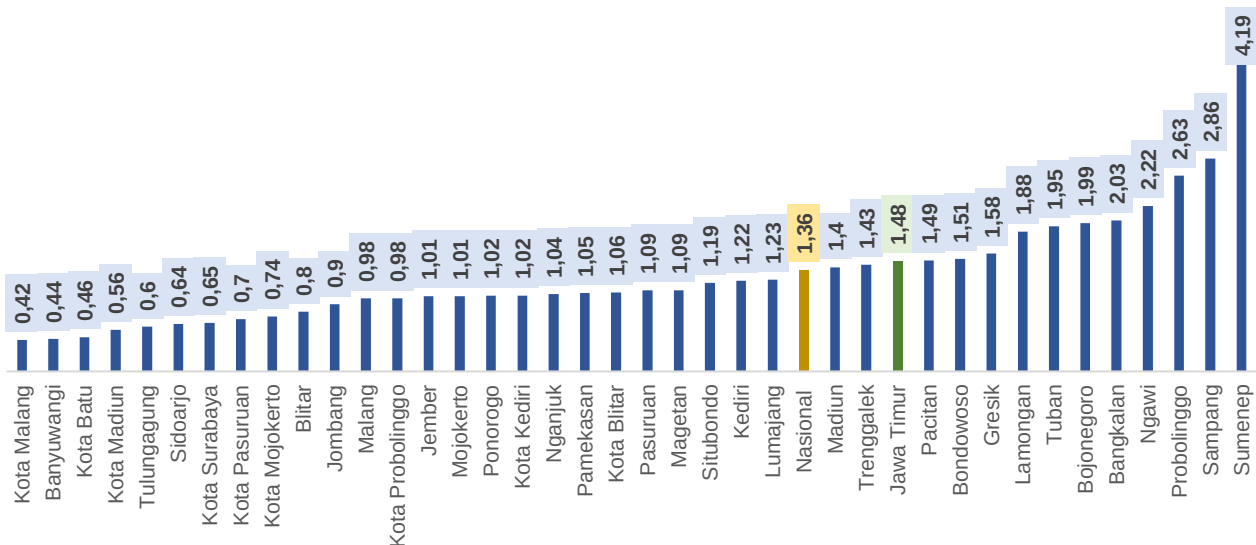
tetapi juga memperhatikan kesenjangan ekonomi antar individu miskin. P1 menjadi dasar untuk memahami kebutuhan intervensi kebijakan, misalnya menentukan seberapa besar bantuan tunai yang diperlukan untuk mengangkat rata-rata pengeluaran orang miskin hingga mencapai garis kemiskinan dan tingkat efektivitas program pengentasan kemiskinan dari waktu ke waktu. Adanya pemahaman mengenai kedalaman kemiskinan melalui P1, pemerintah daerah dapat merancang program bantuan yang lebih terarah, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan finansial langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo tahun 2020-2024 yaitu adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tren dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) memiliki tren fluktuatif. Capaian ditahun 2020 adalah sebesar 1,91 yang kemudian meningkat ditahun 2021 menjadi 2,08, ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,34 yang ditahun 2023 sedikit mengalami kenaikan menjadi 1,59 dan akhirnya ditahun 2024 menjadi 1,19. Tren yang mengalami fluktuasi mencerminkan respons terhadap berbagai kebijakan sosial-ekonomi yang diterapkan, serta tantangan eksternal yang dihadapi selama periode tersebut, namun secara keseluruhan, terdapat progres yang menunjukkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir.

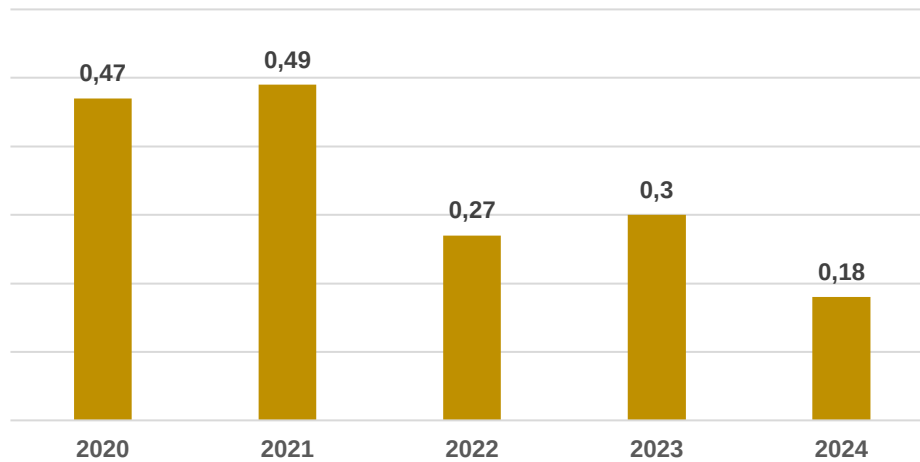


Gambar 2. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo mencapai hasil sebesar 1,19. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana angka capaian Nasional sebesar 1,36 sementara Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,48, Kabupaten Situbondo lebih rendah yang menunjukkan bahwa capaian di Kabupaten Situbondo menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sementara itu posisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang dapat mencerminkan upaya serta kebijakan yang diterapkan di Situbondo dalam mengurangi kedalaman kemiskinan yang telah efektif.

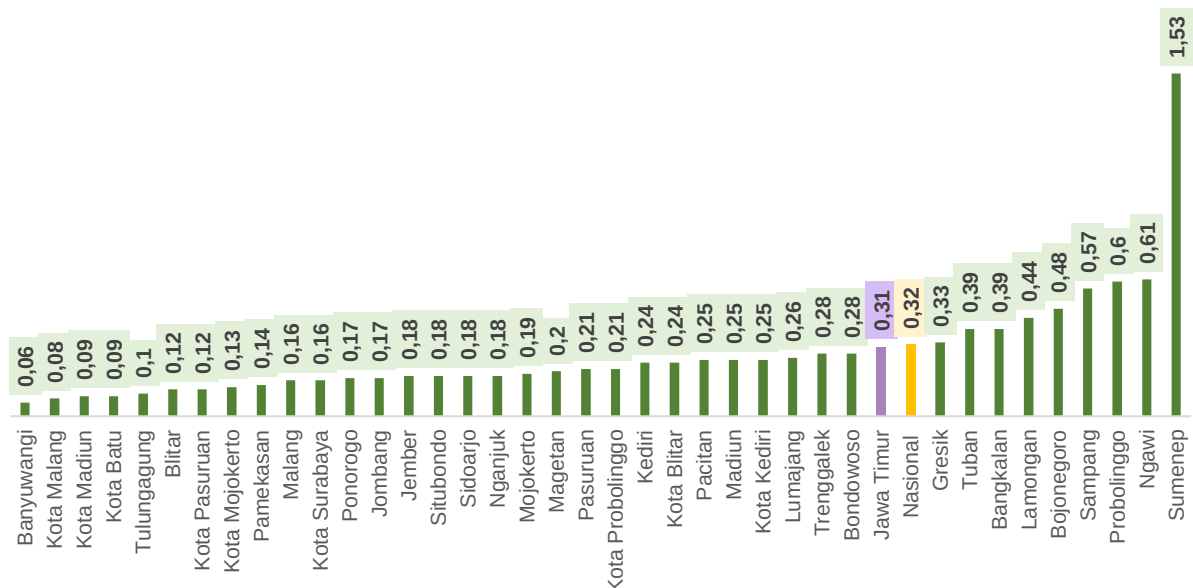
Selain terdapat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), terdapat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menggambarkan seberapa parah tingkat kemiskinan di suatu wilayah, dengan memperhitungkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara teknis, (P2) menunjukkan rata-rata kesenjangan kuadrat antara garis kemiskinan dan pengeluaran masing-masing penduduk miskin. Indikator ini mengukur distribusi kemiskinan dengan memperhitungkan ketimpangan di antara penduduk miskin, sehingga tidak hanya menunjukkan seberapa jauh mereka berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa berat ketimpangan. Maka perlunya pemahaman mengenai keparahan kemiskinan sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan program yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan di antara penduduk miskin melalui intervensi yang lebih spesifik, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, P2 berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan adil.



Gambar 2. 8 Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Dalam lima tahun terakhir yaitu ditahun 2020-2024, Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Ditahun 2020, Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo memiliki capaian sebesar 0,47 yang kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,49. Sementara ditahun 2022, Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dalam arti positif, yakni menjadi sebesar 0,27. Meskipun ditahun 2023 sedikit mengalami peningkatan kembali menjadi 0,30. Kemudian ditahun 2024, Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 0,18 yang merupakan capaian terendah dan penurunan capaian secara positif.



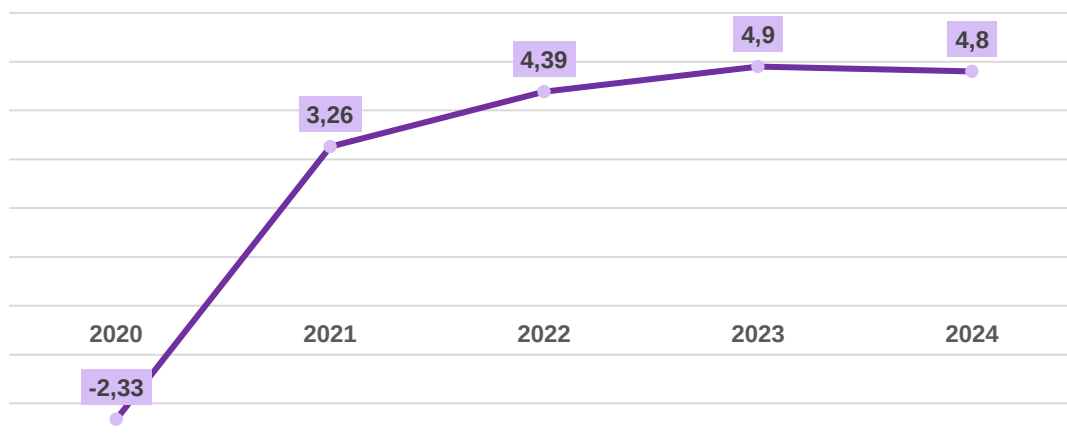
Gambar 2. 9 Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo ditahun 2024 yang memiliki capaian sebesar 0,18 cukup baik apabila dibandingkan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Situbondo seperti Kabupaten Probolinggo serta Kabupaten Bondowoso yang memiliki angka cukup tinggi. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo berada di posisi dibawah capaian Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian sebesar 0,31 dan Nasional sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa jarak dan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin membaik yang berarti keparahan kemiskinan juga semakin berkurang. Artinya, program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Situbondo, cukup mempengaruhi dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1 Evaluasi Bidang Produktivitas Ekonomi

Aspek ekonomi sangat penting karena menjadi pondasi utama bagi kemajuan suatu negara, daerah, maupun individu. Karena aspek ekonomi untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa kekuatan ekonomi, kebijakan sosial sulit dijalankan secara berkelanjutan. Selain itu, ekonomi yang kuat memungkinkan suatu daerah memiliki kapasitas fiskal (kemampuan keuangan) untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pusat atau pinjaman luar negeri. Kesejahteraan ekonomi masyarakat juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan politik. Ketimpangan ekonomi yang tinggi sering menimbulkan konflik sosial, sedangkan distribusi ekonomi yang adil memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, peningkatan indikator-indikator perekonomian daerah ini menjadi faktor kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Indikator-indikator tersebut antara lain seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dari Tahun ke Tahun, dan PDRB per Kapita.

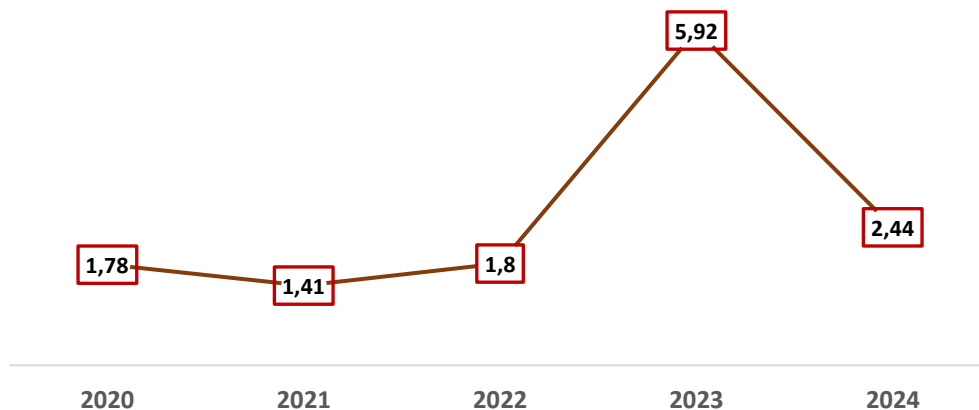


Gambar 2. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Situbondo tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Ditahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo berada di angka -2,33 yang merupakan capaian terendah di 5 tahun terakhir. Kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,26, ditahun 2022 menjadi sebesar 4,39 dan ditahun 2023 menjadi sebesar 4,9 yang merupakan capaian tertinggi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Meskipun ditahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 4,8. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Situbondo sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dengan berbagai sektor ekonomi yang mulai bangkit dan berkembang. Konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menjadi indikator bahwa Kabupaten Situbondo memiliki potensi untuk memperluas basis ekonominya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan.

Disisi lain selain pada Pertumbuhan Ekonomi, tingkat inflasi perlu untuk dijaga karena dengan menjaga inflasi tetap terkendali menjadi prioritas untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika inflasi dibiarkan naik tanpa kendali, masyarakat miskin akan lebih terpukul karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan energi.



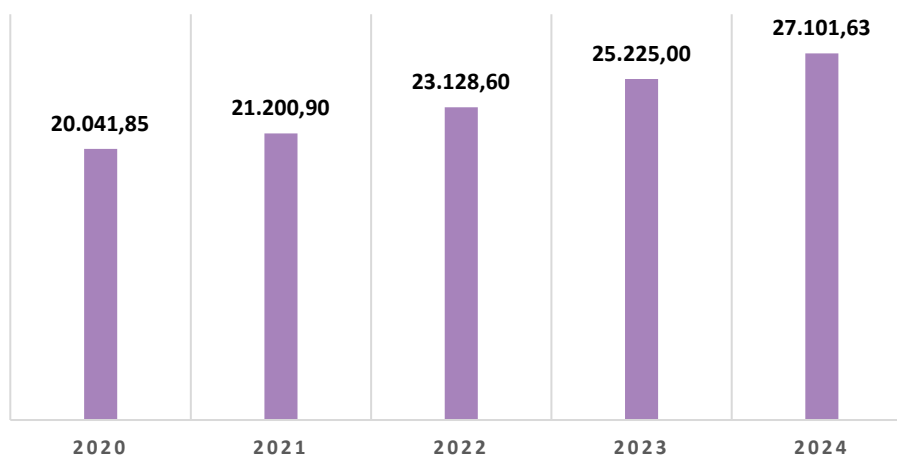
Gambar 2. 11 Inflasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir yakni ditahun 2020-2024, tingkat inflasi tertinggi ada di tahun 2023 menjadi sebesar 5,92. Peningkatan tersebut sangat biasa terjadi karena inflasi di tingkat nasional pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, penyebab inflasi meningkat bisa diakibatkan oleh adanya kenaikan harga komoditas pangan, adanya tekanan biaya produksi dan distribusi, pasokan yang terbatas, maupun ekspektasi harga dan perilaku penjual/masyarakat. Meskipun ditahun 2023 mengalami peningkatan, namun ditahun 2024 kembali mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 2,44. Dinamika fluktuasi tingkat inflasi di Kabupaten Situbondo dapat menjadi cerminan bahwa Kabupaten Situbondo sejauh ini berhasil mengendalikan inflasinya dengan baik sehingga tidak mengalami inflasi berlebihan serta juga tidak mengalami deflasi yang berlebihan.

Jika melihat dari tren pengendalian inflasinya, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo perlu fokus pada strategi yang sejalan dengan program nasional untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian inflasi yang efektif.

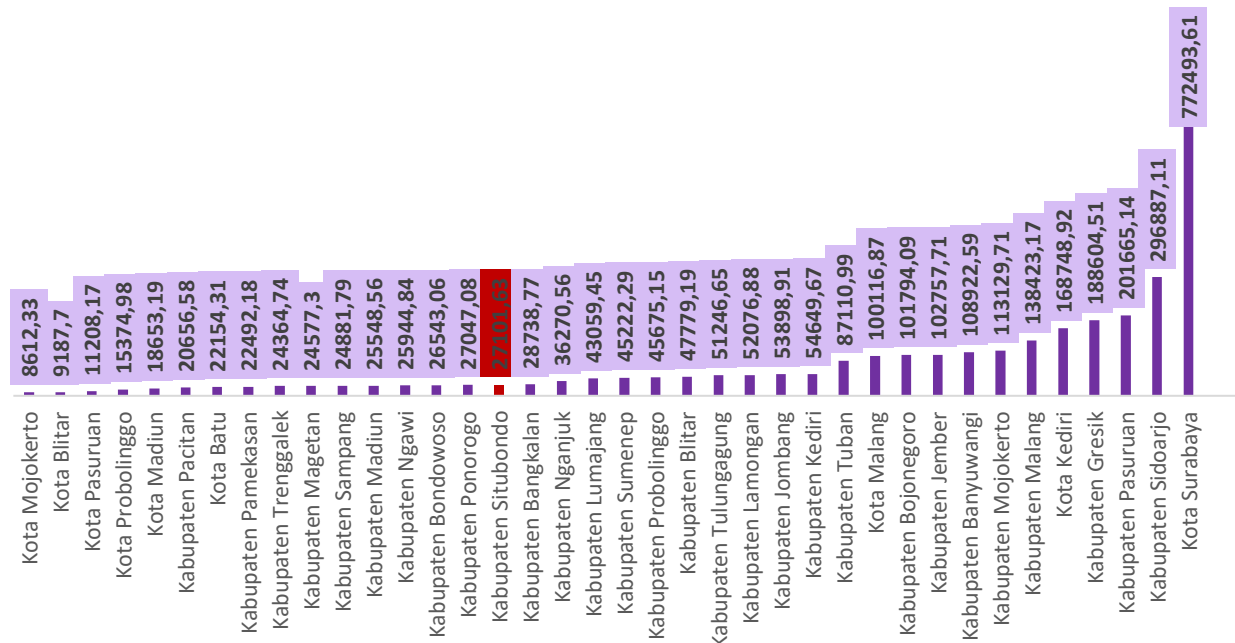
Selain dari sisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di suatu daerah karena menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. PDRB per kapita yang tinggi menandakan tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat lebih besar, meskipun belum tentu merata (karena tidak mencerminkan ketimpangan). Di Kabupaten Situbondo, indikator PDRB per kapita juga menjadi salah satu fokus utama dalam pertimbangan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dari fokus tersebut kemudian melahirkan suatu upaya yang dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi tinggi, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.



Gambar 2. 12 PDRB per Kapita di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

PDRB per Kapita di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir memiliki tren yang meningkat. Ditahun 2020, PDRB per Kapita di Kabupaten Situbondo adalah sebesar Rp 20.041,85 yang kemudian disetiap tahun hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 27.101,63. Kenaikan ini mencerminkan bahwa ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya semakin mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Tren peningkatan ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah mungkin telah memberikan hasil yang signifikan, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.



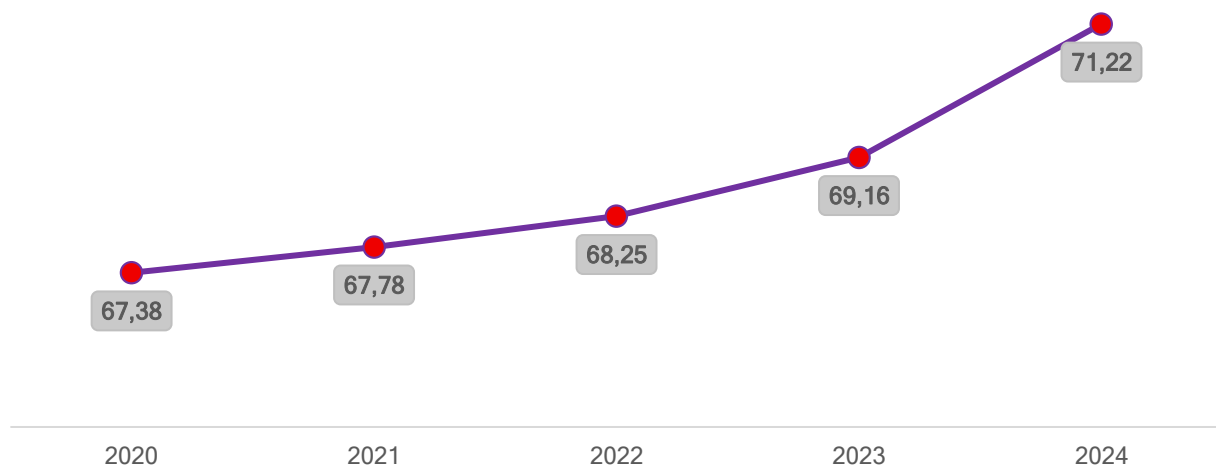
Gambar 2. 13 PDRB per Kapita di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

Meskipun PDRB per Kapita Kabupaten Situbondo ditahun 2024 mengalami peningkatan, namun memiliki posisi yang cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo serta Kabupaten Jember yang menjadi kabupaten terdekat dari Kabupaten Situbondo. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya mulai mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tingkat kesejahteraan ekonomi di daerah ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini dapat berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan, di mana diperlukan strategi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan pendapatan secara lebih merata di seluruh sektor ekonomi lokal.

2.3.2 Evaluasi Bidang Produktivitas Manusia

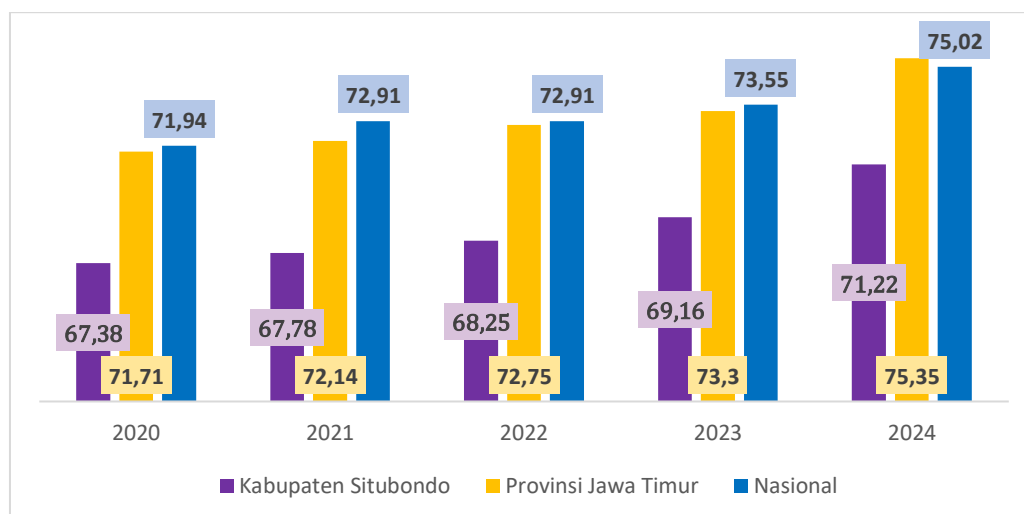
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ringkasan komprehensif kualitas hidup yang merangkum tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pendidikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan dimensi standar hidup layak oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Ketiganya dinormalisasi ke skala 0–1 lalu digabung dengan rata-rata geometrik, sehingga kelemahan pada satu dimensi tidak bisa ditutup oleh keunggulan dimensi lain. Secara kebijakan, konsekuensinya jelas: peningkatan IPM yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika layanan kesehatan dasar, capaian pendidikan, dan daya beli rumah tangga sama-sama membaik.



Gambar 2. 14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025

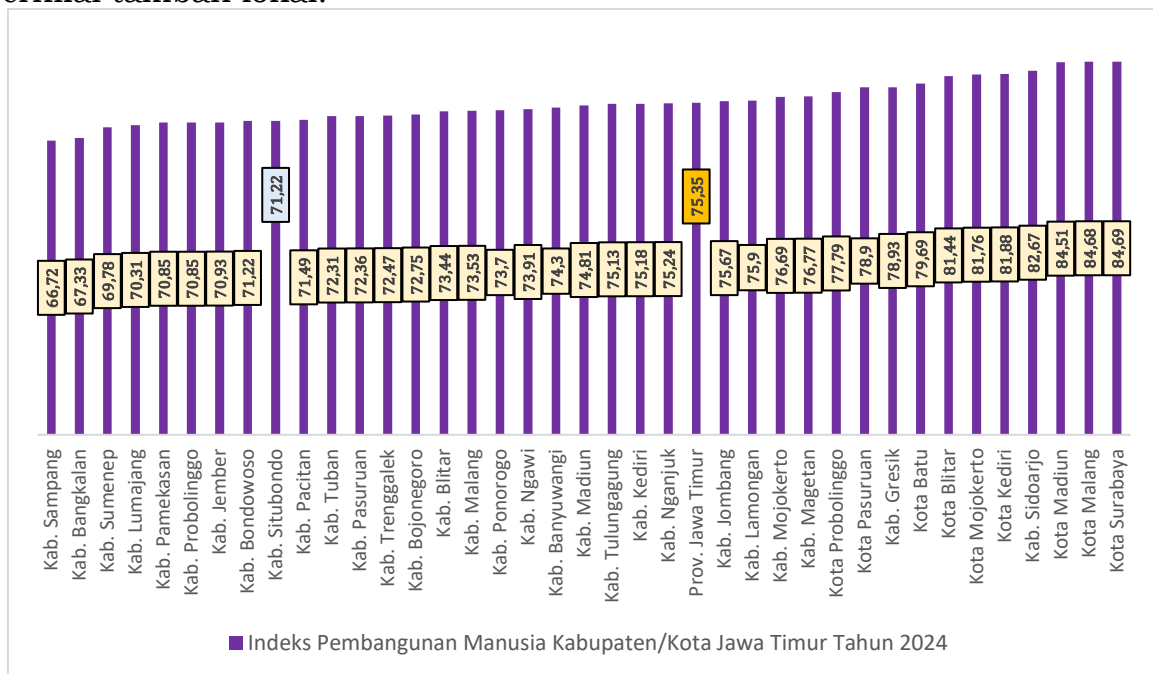
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ringkasan komprehensif kualitas hidup yang merangkum tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pendidikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan dimensi standar hidup layak oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Ketiganya dinormalisasi ke skala 0–1 lalu digabung dengan rata-rata geometrik, sehingga kelemahan pada satu dimensi tidak bisa ditutup oleh keunggulan dimensi lain. Secara kebijakan, konsekuensinya dengan peningkatan IPM yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika layanan kesehatan dasar, capaian pendidikan, dan daya beli rumah tangga sama-sama membaik.



Gambar 2. 15 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2025

Dibanding rerata Provinsi Jawa Timur dan nasional, Situbondo menunjukkan pola konvergensi yang menggembirakan. Selisih terhadap nasional menyempit dari 4,56 poin tahun 2020 menjadi 3,80 poin 2024, sementara gap terhadap Jawa Timur berkurang dari 4,33 menjadi 4,13 poin pada periode yang sama. Artinya, percepatan 2024 bukan hanya menaikkan level absolut, tetapi juga memperbaiki posisi relatif terutama mendekati rerata nasional. Untuk memperkecil jarak dengan Jawa Timur, kebijakan RAT perlu menaruh bobot lebih besar pada pengungkit yang historisnya paling responsif di kabupaten: peningkatan RLS melalui program kejar paket dan sistem peringatan dini putus sekolah, serta penguatan daya beli lewat penciptaan dan penempatan kerja berkualitas pada sektor-sektor bernilai tambah lokal.



Gambar 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

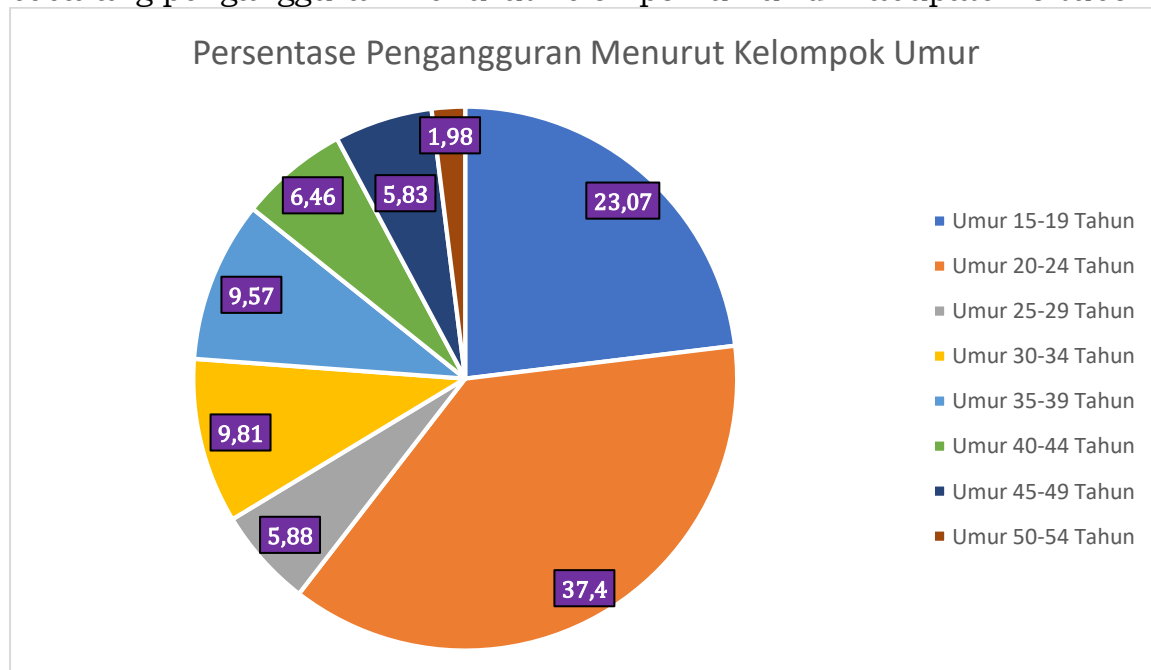
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Pada peta kabupaten/kota se-Jawa Timur, Situbondo 71,22 berada di kelompok menengah masih di bawah rerata provinsi 75,35, jauh di bawah kota-kota besar seperti Surabaya yang berada di kisaran sangat tinggi, namun lebih baik daripada beberapa kabupaten dengan IPM terendah seperti Sampang sekitar 65,7. Pola ini menegaskan tantangan struktural wilayah non-kota khususnya pada pendidikan dan standar hidup sekaligus peluang pembelajaran sejawat. RAT dapat memanfaatkan *benchmarking* ke kabupaten yang berhasil menaikkan RLS melalui paket kesetaraan dan pengurangan APS, serta replikasi model “UMKM naik kelas” dari daerah tetangga yang sukses mengintegrasikan pendampingan bisnis, pembiayaan, dan akses pasar digital. sebagai indikator *outcome* lintas-sektor, tetapkan target 2025 sekitar 71,6–71,8, dan kaitkan secara eksplisit ke indikator antara UHH (+0,20 tahun), RLS (+0,10 tahun), HLS (+0,10 tahun), dan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang melampaui inflasi. Turunkan ke rencana kerja OPD kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, koperasi/UMKM, dan sosial, dengan fokus geospasial pada desa kantong

kemiskinan dan putus sekolah. Dengan tata kelola berbasis hasil dan pemantauan triwulanan, Situbondo tidak hanya menjaga capaian positif IPM, tetapi juga mempercepat konvergensi menuju rerata provinsi dan nasional.

2.3.3 Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

Seberapa efektif pasar kerja Situbondo menyerap penduduk usia kerja serta kualitas pekerjaan yang tersedia. Dua indikator utama yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) proporsi penganggur yang aktif mencari dan siap bekerja terhadap angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk angkatan kerja (bekerja + penganggur) terhadap total penduduk usia kerja. Kedua indikator ini dibaca bersama indikator pendukung mutu kerja seperti tingkat pekerjaan formal dan informal, upah relatif, komposisi sektor pertanian, manufaktur, jasa, serta struktur pengangguran menurut umur khususnya 15–24 tahun yang menentukan transisi sekolah–kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur proporsi penganggur terbuka yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang aktif mencari kerja, dan siap mulai bekerja dibandingkan angkatan kerja (bekerja + penganggur). TPT berbeda dari kemiskinan tidak menilai kemampuan konsumsi/pendapatan rumah tangga, melainkan keterserapan tenaga kerja dan efisiensi pasar kerja. Sebelum itu berikut disajikan sebarang pengangguran menurut kelompok umur di Kabupaten Situbondo:

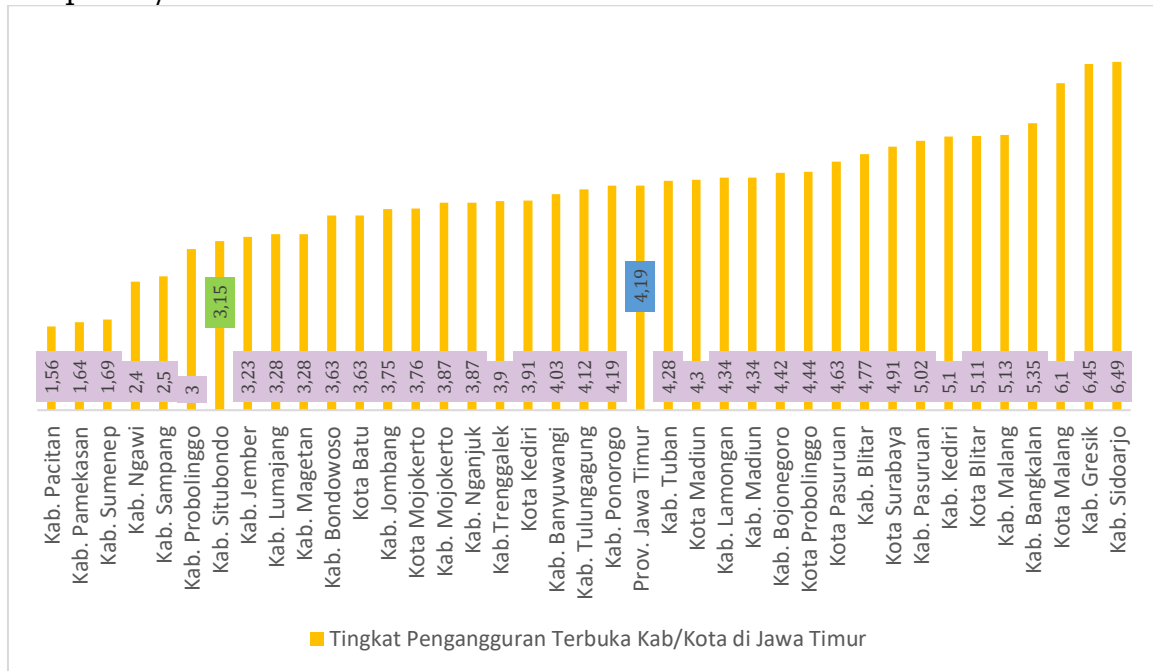


Gambar 2. 17 Persentase Pengangguran Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Sumber : Bapperida Kabupaten Situbondo, 2024

Berangkat dari struktur pengangguran menurut umur, pasar kerja Situbondo 2024 didominasi penganggur muda: kelompok 20–24 tahun menyumbang 37,4% dari total penganggur, disusul 15–19 tahun sebesar 23,07%. Artinya, hampir enam dari sepuluh penganggur 60,5% berada pada rentang usia transisi sekolah–kerja. Porsi berikutnya beralih ke 30–34

tahun 9,81% dan 35–39 tahun 9,57%, sementara usia 25–29 tahun 5,88%, 40–44 tahun 6,46%, 45–49 tahun 5,83%, dan 50–54 tahun 1,98% relatif kecil. Hasil ini mengisyaratkan bahwa hambatan utama terletak pada *first-job placement* dan *mismatch* keterampilan awal karier bukan pada pekerja berpengalaman sehingga intervensi yang paling relevan adalah penguatan *school-to-work transition* (magang terstruktur, apprenticeship, bursa kerja kampus/SMK, layanan konseling karier, dan pelatihan berbasis permintaan industri lokal). Berikut ini merupakan grafik persentase TPT masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur:



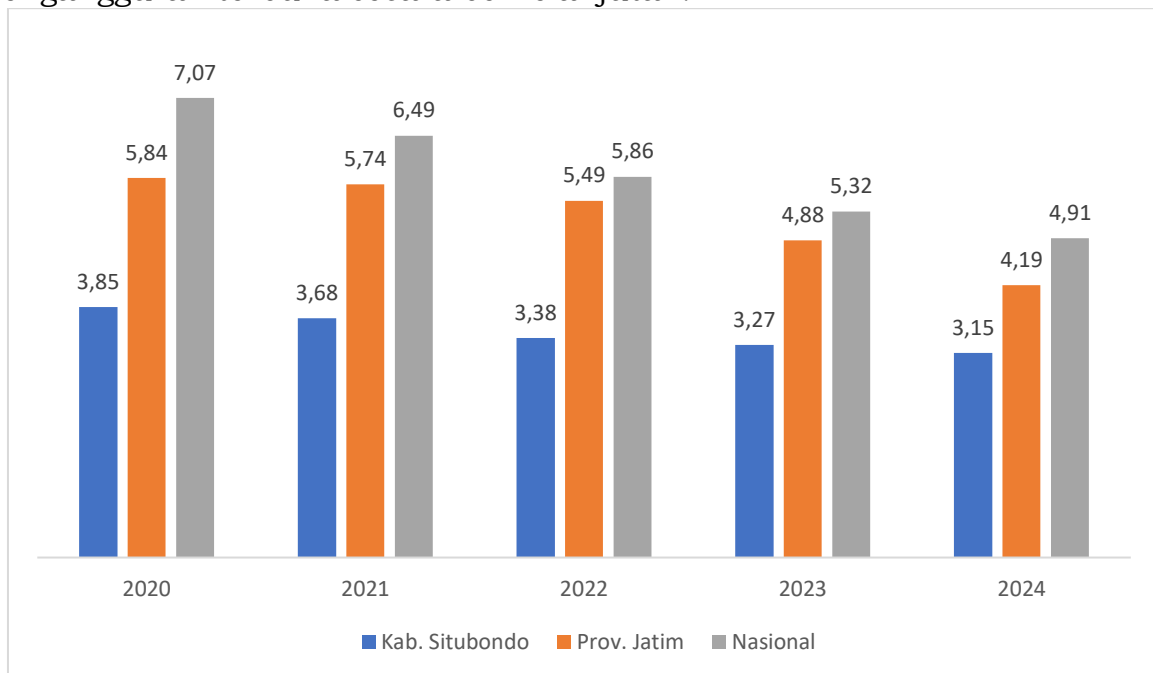
Gambar 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Dari sisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) antar daerah di Jawa Timur tahun 2024, Situbondo berada pada kelompok rendah dengan TPT 3,15%, lebih baik daripada rata-rata provinsi 4,19% dan jauh di bawah kabupaten/kota dengan TPT tertinggi berkisar >6%. Rentang provinsi sendiri dari 1,56% di titik terendah hingga 6,49% di tertinggi sehingga posisi Situbondo menegaskan pasar kerja yang relatif terserap dibanding banyak daerah lain. TPT rendah mengartikan tidak otomatis berarti pasar kerja berkualitas bisa juga beriringan dengan serapan sektor informal/pertanian atau TPAK yang belum optimal, karena itu temuan TPT ini perlu dibaca berpasangan dengan indikator TPAK dan mutu pekerjaan.

Namun, meskipun Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Situbondo dapat terus

mengoptimalkan potensi ekonominya dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan.

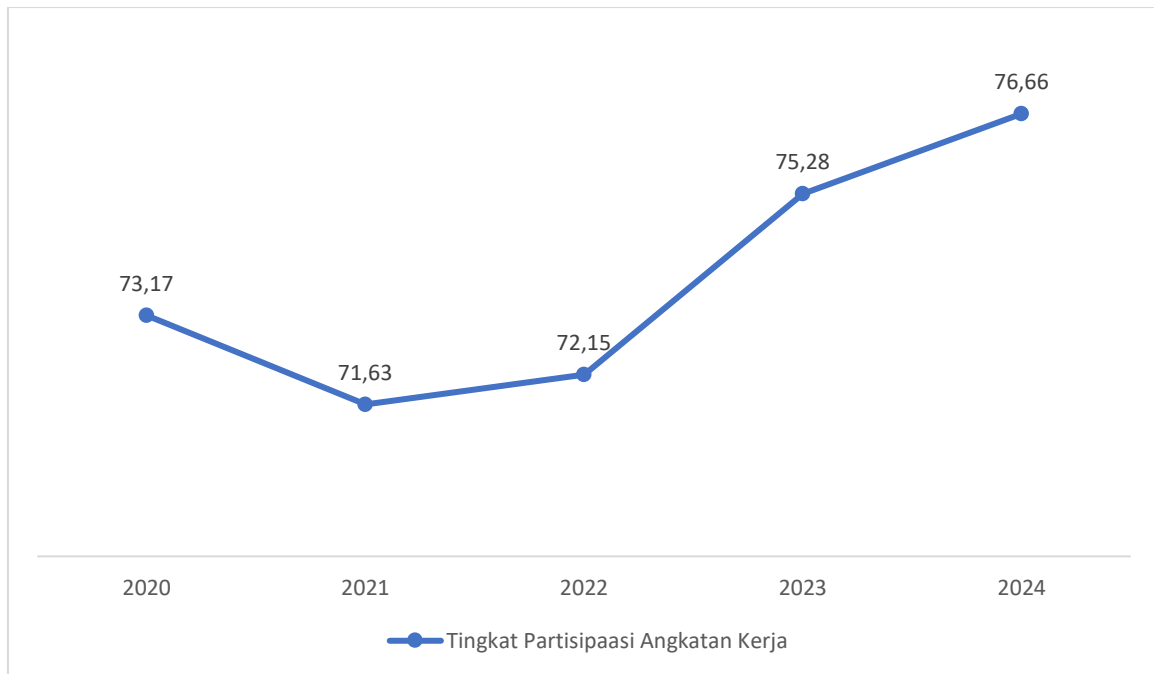


Gambar 2. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2025

Secara hasil TPT tahun 2020–2024, TPT Situbondo turun konsisten dari 3,85% ditahun 2020, 3,68% ditahun 2021, 3,38% ditahun 2022, 3,27% ditahun 2023, dan 3,15% ditahun 2024, menunjukkan perbaikan yang stabil bahkan saat provinsi dan nasional juga menurun. Sepanjang periode yang sama, Jawa Timur turun dari 5,84% ke 4,19% dan nasional dari 7,07% ke 4,91%. Dengan demikian, gap Situbondo terhadap provinsi melebar positif lebih baik menjadi 1,04 pada 2024, dan selisih terhadap nasional mencapai 1,76. Pola ini mengindikasikan resilience pasar kerja lokal dan keberhasilan kebijakan penyerapan tenaga kerja, tetapi tetap menyisakan pekerjaan rumah pada kantong pengangguran muda yang mendominasi struktur penganggur.

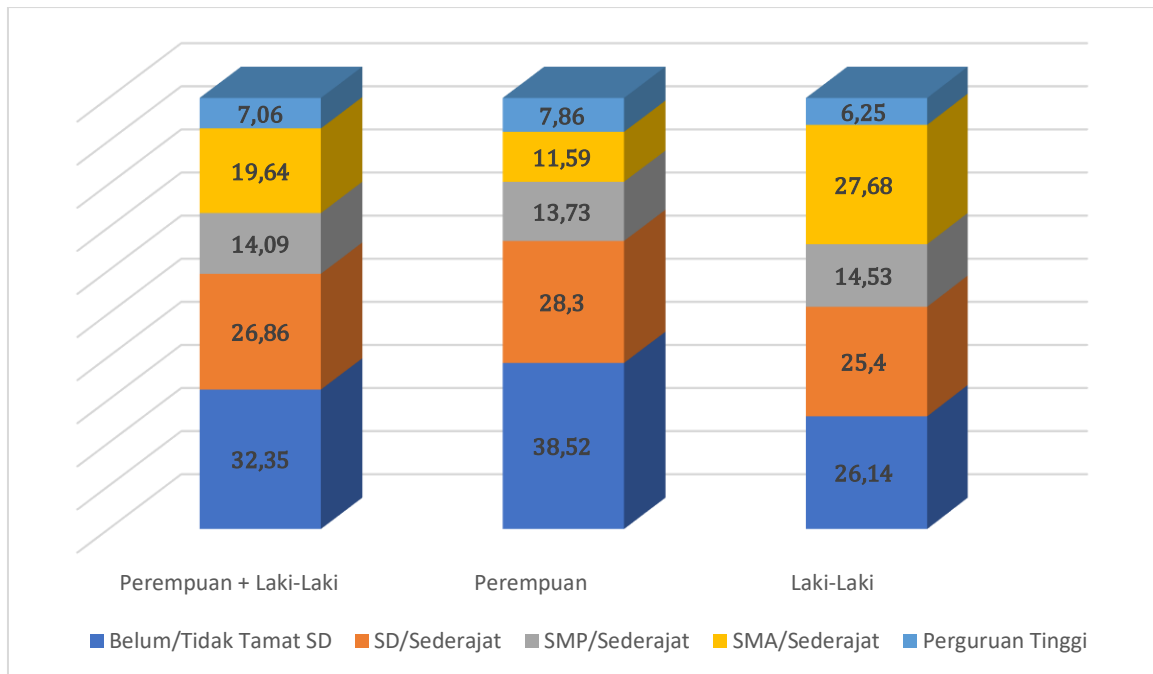
Selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi dalam dinamika pasar tenaga kerja di suatu daerah. Apabila melihat perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat. Berikut ini disajikan data secara lebih jelas untuk mengetahui perkembangan TPAK Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 - 2024.



Gambar 2. 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2025

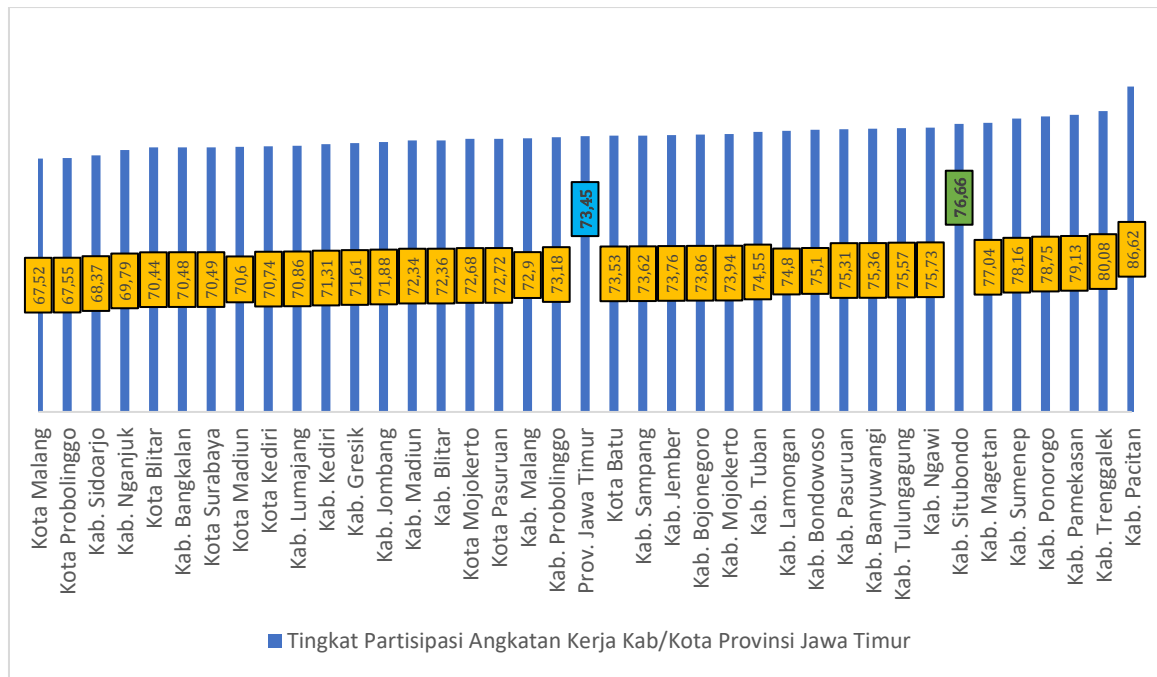
Capaian TPAK Kabupaten Situbondo. Pada 2024, TPAK Situbondo mencapai 76,66 level tertinggi lima tahun terakhir setelah fase melemah di 2021 71,63 dan konsolidasi di 2022 72,15. Lonjakan dua tahun terakhir 2023 dan 2024 kenaikan sebesar 4,51 poin menandakan ekspansi pasokan tenaga kerja yang sehat: semakin banyak penduduk usia 15+ yang masuk angkatan kerja dan sinyal permintaan tenaga kerja lokal yang membaik. Kombinasi tren TPAK yang naik dengan TPT yang turun memberi indikasi bahwa peningkatan partisipasi tidak berakhir pada penumpukan penganggur, melainkan diikuti penyerapan. Namun, karena struktur pekerja masih didominasi pendidikan dasar-menengah, akselerasi partisipasi perlu dikawal dengan upskilling cepat dan kanalisasi ke pekerjaan lebih produktif agar kenaikan TPAK berkonversi pada produktivitas dan standar hidup, bukan sekadar memperbanyak jam kerja informal.



Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2025

Struktur tenaga kerja yang bekerja masih didominasi pendidikan dasar: hasil penggabungan komposisi laki-laki dan perempuan menunjukkan 32,35% pekerja berpendidikan belum/tidak tamat SD, 26,86% SD/ sederajat, 14,09% SMP, 19,64% SMA, dan hanya 7,06% Perguruan Tinggi. Artinya, akselerasi TPAK banyak ditopang oleh kelompok berpendidikan rendah-menengah, yang produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan pekerjaan layak, pelatihan singkat yang spesifik kebutuhan industri lokal, dan akses mobilitas kerja. Agar lonjakan TPAK bermakna bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, RAT perlu mengikat peningkatan partisipasi dengan kualitas penyerapan: perluasan pelatihan berbasis permintaan (micro-credential untuk operator mesin, quality control, logistik, pemasaran digital), job-matching dan job-placement terukur, sertifikasi kompetensi, serta layanan career center yang memudahkan transisi sekolah-kerja dan re-entry pekerja yang sempat di luar angkatan kerja.



Gambar 2. 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Perbandingan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara relatif, posisi Situbondo berada di kuartil atas se-Jatim senilai 76,66 lebih tinggi sekitar tiga poin dari rerata provinsi sebesar 73,6. Artinya, Situbondo unggul pada sisi aktivasi angkatan kerja dibanding banyak daerah lain, dan dikombinasikan dengan TPT yang rendah menggambarkan pasar kerja yang relatif sehat. Tantangan ke depan adalah menjaga keunggulan ini tetap berkualitas: dorong pergeseran partisipasi ke sektor bernilai tambah seperti agro-processing, perikanan hilir, pariwisata, jasa modern. Memperluas kemitraan BLK/SMK-industri dengan target penempatan terukur, dan pantau indikator mutu kerja dengan formalitas, setengah penganggur, jam kerja <35 jam, dan median upah. Dengan begitu, kelebihan TPAK Situbondo tidak rapuh oleh dominasi pekerjaan informal, tetapi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

BAB III

STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

3.1.1 Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.



Gambar 3. 1 Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029

Sumber : RPJMN, 2025

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

**Gambar 3. 2 Program Prioritas Presiden Republik Indonesia
Periode 2025-2029**

Sumber: RPJMN, 2025



Gambar 3. 3 Kerangka Pikir RPJMN Periode 2025-2029

Sumber: RPJMN, 2025

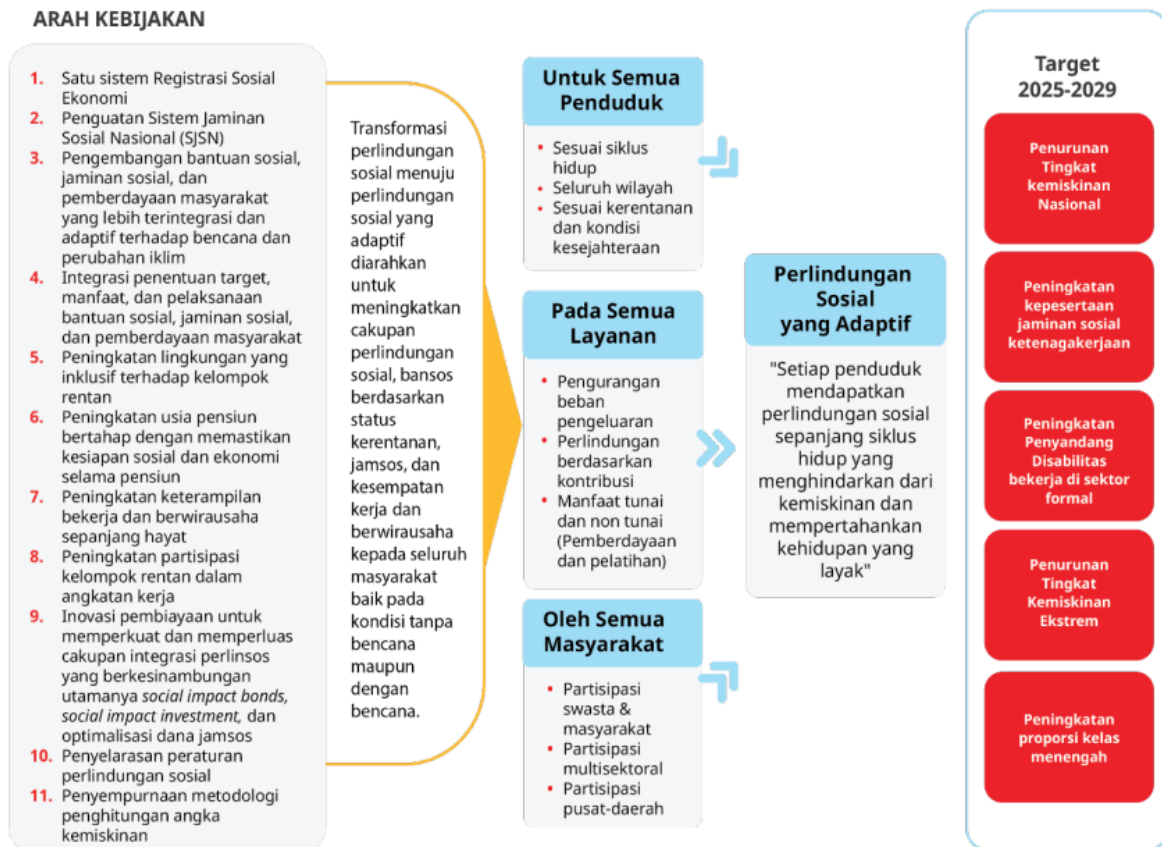
RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada:

- penurunan kemiskinan,
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, serta
- diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

3.1.2 Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Secara visual kerangka pikir penurunan tingkat kemiskinan ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 3. 4 Kerangka Pikir Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber: RPJMN, 2025

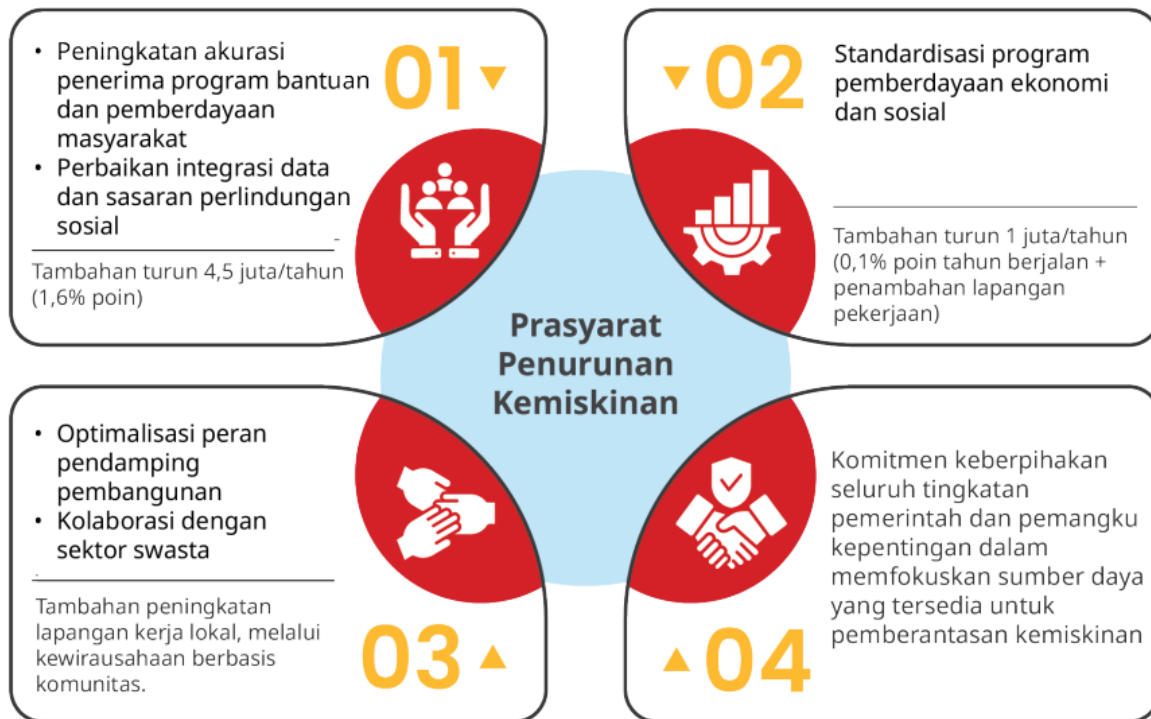
Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi sebagai berikut.



Gambar 3. 5 Empat Strategi Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan

Sumber: RPJMN, 2025

Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan empat prasyarat sebagai berikut.



Gambar 3. 6 Empat Prasyarat Penurunan Kemiskinan

Sumber: RPJMN, 2025

3.2 STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yang dirancang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan demi masyarakat Jawa Timur lebih Sejahtera, yaitu:

“BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Selanjutnya, Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu

- 1) Jatim Sejahtera,** Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.
- 2) Jatim Kerja,** Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
- 3) Jatim Akses,** Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
- 4) Jatim Cerdas,** Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk

semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

- 5) **Jatim Sehat**, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).
- 6) **Jatim Berkah Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
- 7) **Jatim Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.
- 8) **Jatim Harmoni**, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.
- 9) **Jatim Lestari**, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Pada periode 2025-2029, ditetapkan dua target utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama, menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sekaligus memperoleh perlindungan sosial yang adaptif untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko dan krisis. Kedua, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan yang inklusif. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, dan lanjut usia serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergradiasi dari kemiskinan. Dalam rangka mengawal keberhasilan Misi Jatim Sejahtera, dirumuskan Tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut.

Tujuan Pertama & Kedua, Sasaran dan Indikator	
1. TERWUJUDNYA PENGENTASAN KEMISKINAN	
Tingkat Kemiskinan (%)	
<i>Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif</i>	
<i>Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi</i>	
2. TERWUJUDNYA PENGURANGAN KETIMPANGAN	
Rasio Gini (%)	
<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Perdesaan</i>	
<i>Persentase Desa Mandiri (%)</i>	

Gambar 3. 7 Tujuan dan Indikator Misi Jatim Sejahtera

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2025

Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di pedesaan, diterapkan pendekatan lintas sektoral dan spasial secara terpadu, melalui strategi Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan Fokus Pembangunan melalui Pemenuhan sistem perlindungan sosial, pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dan berbasis satu data serta peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan. Strategi ini mencakup penguatan peran perempuan dalam program pemberdayaan serta pemberian prioritas kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui skema bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara sistematis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkannya, strategi utama yang diterapkan berfokus pada pemenuhan perlindungan sosial melalui penguatan sistem perlindungan yang komprehensif, penyediaan rumah layak huni yang terintegrasi, serta pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dalam mendukung implementasi strategi ini, arah kebijakan yang diambil mencakup penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu, penyediaan hunian layak yang terintegrasi dengan layanan sosial, serta peningkatan akses dan kapasitas ekonomi bagi masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar sektor dalam pemberdayaan kelompok rentan, memastikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pula arah kebijakan dan fokus pembangunan pada Transformasi Sosial di tahapan pertama (2025-2029).

Strategi

Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan Fokus Pembangunan melalui Pemenuhan sistem perlindungan sosial, pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dan berbasis satu data serta peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan

Sedangkan arah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

Arah Kebijakan

1. Percepatan pembangunan pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
2. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy)
3. Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
5. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
6. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
10. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
11. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan

Gambar 3. 8 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan pada Transformasi Sosial

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2025

3.3 STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Situbondo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas,

maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 adalah Situbondo Naik Kelas (Kebersamaan, Adil, dan Sejahtera).

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, diketahui bahwa setiap diksi dalam visi memuat semangat dan makna yang kuat dan mendalam. Keterkaitan antara Visi dengan Misi secara substansial meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Situbondo. Merujuk pada hasil penjabaran pokok-pokok visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Situbondo selama tahun 2025-2029 sebagai berikut.

- A. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing;
- B. Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
- C. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan yang Adil sebagai Pendorong Percepatan Pembangunan Potensi Strategis dan Kewilayahan;
- D. Misi 4 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif dan Inovatif;
- E. Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas.

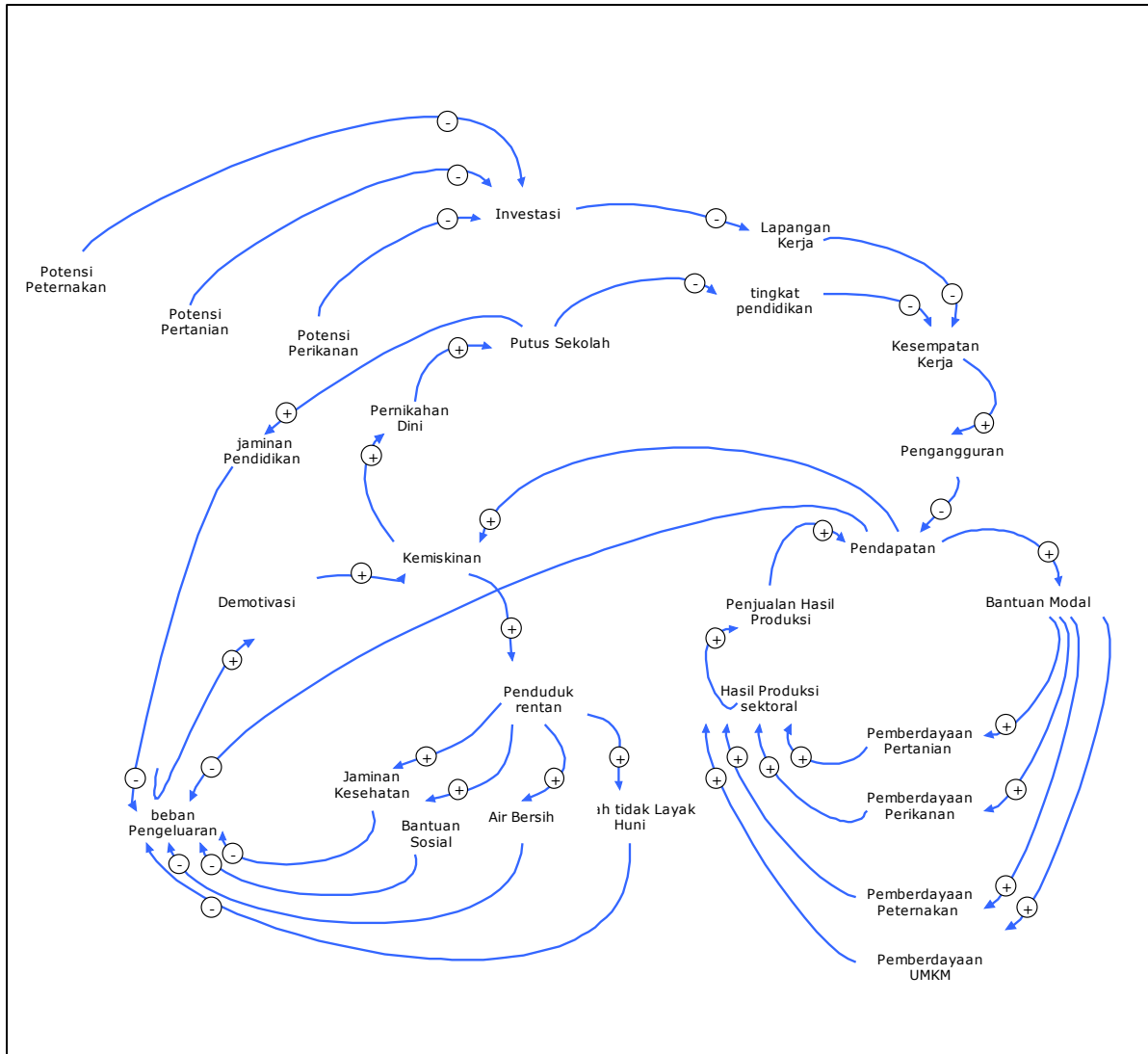
Pada Misi dua, diarahkan untuk melakukan percepatan dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berdampak dapat menanggulangi kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan simultan penguatan sektor strategis dan pengembangan sektor ekonomi rakyat yaitu Usaha Mikro, Koperasi dan Pertanian serta Perikanan. Sektor strategis meliputi sektor pertanian yang diarahkan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi sub sektor perikanan, peternakan dan hortikultura serta didorong dapat mendukung ketahanan pangan daerah (food security). Sektor strategis lainnya meliputi sektor industri dan perdagangan serta UMKM yang secara fundamental akan terus tumbuh dan memiliki daya ungkit (Leverage) besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di sektor pangan menjadi elemen penting dan strategis apalagi saat ini pemerintah menempatkan pangan sebagai salah satu fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pangan menyangkut hajat hidup dan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Aktifitas di sektor pangan berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi, investasi di sektor pangan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat rantai pasok, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan logika tersebut, maka Misi dua dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Strategi pembangunan dirumuskan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu cara/pendekatan/kebijakan/tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar implementasi program dan kegiatan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD. Rumusan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran disajikan secara detail :

1. Pemenuhan daya dukung bagi berkembangnya sektor strategis guna mendorong percepatan peningkatan produksi secara berkelanjutan
2. Dukungan Manajemen dan pemasaran produk unggulan (Channelling) Usaha Mikro dengan pihak strategis agar usahanya dapat berkelanjutan
3. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas
4. Koordinasi dengan pihak user yang difokuskan untuk Matching Skills kompetensi Angkatan Kerja dengan kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan daya tampung lapangan kerja
5. Pola intervensi program sosial (PPKS) berbasis spasial (titik Lokasi) sesuai dengan prioritas daerah selama periode RPJMD
6. Integrasi program (Cross Cutting) lintas Perangkat Daerah yang sistematis dan terencana dalam percepatan penurunan PPKS khususnya kemiskinan
7. Pelibatan pihak strategis (Hexahelic) untuk secara bersama mempercepat penurunan PPKS secara bertahap
8. Penguatan monitoring kebutuhan supply dan demand bahan pangan secara real time guna memastikan sisi penyimpanan (Stock), distribusi dan kualitasnya telah memenuhi standar
9. Implementasi kebijakan ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah.
10. Menjamin kelancaran distribusi barangbarang kebutuhan pokok masyarakat untuk menghindari peningkatan harga.

3.3.1 Telaah RPKD Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029 Analisis Akar Masalah (Determinan) Kemiskinan

Mencermati sistem sederhana yang telah dibuat, pengembangan selanjutnya dari sistem dinamis ialah menampilkan sistem kompleks. Fungsinya untuk menampilkan unsur-unsur (variabel) yang menyusun sistem sederhana dalam satu kesatuan yang kompleks. Sistem kompleks ini kemudian menjelaskan secara detail relasi dan kebertautan masing-masing unsur penyusun. Penjelasan ini biasanya terkait dengan mekanisme dan derajat relasi yang ditentukan pada saat pembuatan sistem tersebut. Untuk lebih ringkasnya, relasi yang menghubungkan setiap unsur menunjukkan kekuatan sistem itu sendiri. Berikut sistem kompleks yang telah dibuat dan siap untuk di simulasikan.



Gambar 3. 9 Causal Loop Diagram Kemiskinan Kabupaten Situbondo

Sumber: Data Diolah Tim Perumus, 2024

Merujuk pada gambaran umum dan profil kemiskinan yang ada pada BAB II dan Bab III, dapat dipetakan beberapa **sub sistem pertama** menguraikan sub sistem mengurangi beban yang terdiri dari penduduk rentan meningkat maka peningkatan bantuan jaminan sosial, bantuan sosial, air bersih dan rumah tidak layak huni. Ketika meningkatkan bantuan jaminan sosial, bantuan sosial, air bersih dan rumah tidak layak huni, beban pengeluaran semakin menurun tetapi meningkatkan demotivasi. Demotivasi artinya yaitu perilaku masyarakat untuk memiskinkan dirinya sendiri untuk menerima bantuan termasuk kemiskinan juga menjadi semakin meningkat.

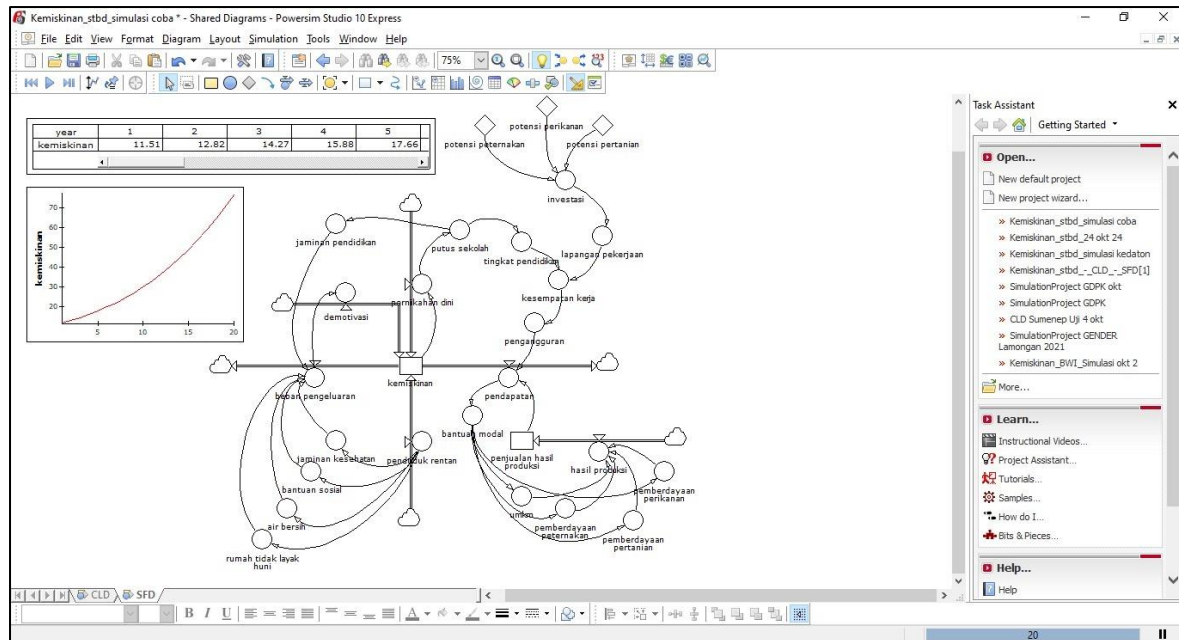
Sub sistem kedua yaitu ketenagakerjaan, pada dasarnya penyebab salah satu kemiskinan yaitu pengangguran. Sub sistem kedua menerjemahkan hubungan kemiskinan dengan ketenagakerjaan. Peningkatan kesempatan kerja kemudian dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten situbondo. Pengurangan pengangguran terbuka ini berarti lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan dan akses pada penghasilan yang stabil. Sehingga dapat

mengurangi tekanan pada sistem kesejahteraan sosial dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesempatan kerja yang baik di Kabupaten Situbondo tentunya perlu didukung dengan investasi yang tepat karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Investasi khususnya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan kelautan

Sub sistem ketiga yaitu terdiri atas hubungan kemiskinan dengan pemberdayaan, artinya semakin meningkat kemiskinan pemerintah akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pelatihan untuk produksi pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan. Meningkatnya produksi unggulan meningkatkan pendapatan sehingga menurunkan angka kemiskinan. sub sistem kedelapan yaitu investasi daerah yang merupakan variabel konstan. Investasi daerah dapat meningkatkan total produksi karena menambahkan modal terhadap perputaran produksi termasuk juga berpengaruh hubungan dengan meningkatkan kebutuhan lapangan kerja.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan proses dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dengan semakin banyaknya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan memacu masyarakat miskin untuk berusaha/ menjalankan kegiatan usaha dibidang Pertanian, UMKM, , mengingat ketiga usaha tersebut merupakan jenis usaha yang secara umum dapat diakses oleh masyarakat miskin, dan sekaligus menjadi potensi usaha yang terdapat di Kabupaten Situbondo. Berbekal dari kemampuan dan kemauan masyarakat miskin dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan, maka secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap berkembangnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya omzet usaha. Selain itu, berkembangnya usaha pertanian juga dapat mendukung meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Situbondo.

Setelah dibangun suatu sistem (*causal loop diagram*) maka dilakukan uji simulasi. dengan Model yang disusun menggunakan kerangka konseptual yang sama dengan model pada tahapan kedua, namun menggunakan bahasa yang berbeda. CLD yang dihasilkan pada langkah ini selanjutnya dikonversi ke model simulasi agar dapat dipahami secara lebih cepat untuk tujuan pengembangan model itu sendiri. Tahap simulasi ini dapat dilanjutkan pada tahap validasi model (*model testing*). Ada dua langkah dalam melakukan validasi, yaitu validasi terstruktur dan validasi kinerja. Validasi struktur digunakan untuk memvalidasi CLD yang dibuat, sedangkan validasi kinerja digunakan untuk validasi stok aliran atau model simulasi yang telah dibuat.



Gambar 3. 10 Model Simulasi SFD Kemiskinan Kabupaten Situbondo
Sumber : Data Diolah 2025

Dari gambar di atas terdapat satu *stock* pada simulasi SFD yang telah dilakukan yaitu kemiskinan. data yang dipergunakan untuk menguji dengan data persentase kemiskinan di tahun 2024 yaitu dengan nilai 11,52 terdapat 3 unsur *out flow* yaitu terkait pendapatan, beban pengeluaran, hasil produksi, Data yang digunakan dalam pendapatan yaitu Pendapatan perkapita. Pada inflow menggunakan unsur demotivasi, pernikahan dini, penduduk rentan. Dalam inflow dan outflow ada stock yang terhubung dari masing-masing.

Pengaruh variabel yang mempunyai aliran keluar banyak yaitu pendapatan, dimana pendapatan mempengaruhi aliran keluar hasil produksi . Pendidikan dan kesehatan menggunakan data indikator yang disebutkan pada paragraph sebelumnya. Daya beli menggunakan data indikator indeks pengeluaran atau *purchasing power parity*.

Pada tahap selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan efektivitas model maka diperlukan faktor pengungkit dari tiap elemen dari model yang telah dibuat. Untuk mencari faktor pengungkit dalam simulasi dan BOT berikut dilakukan dengan uji *leverage*. Uji berikut mengambil posisi pada 1 *stock*, yakni angka kemiskinan Kabupaten Situbondo. Pada level atau *stock* angka kemiskinan dilakukan intervensi pada setiap elemen dengan total intervensi pada 19 elemen. Pola intervensi ini dilihat dari nilai akhir intervensi pada *stock* angka kemiskinan dengan nilai akhir dari elemen kesejahteraan yang bermacam-macam, pola ini kemudian di intervesikan dengan dikalikan 1,5 untuk semua elemen. Pada tabel berikut di tuangkan hasil gap nilai level jika intervensi di kalikan 1,5.

no	unsur	tahun akhir	intervensi	hasil akhir	gap	leverage
1	pernikahan dini	17.66	1.5	15.24	2.42	3
2	putus sekolah	17.66	1.5	17.57	0.09	
3	tingkat pendidikan	17.66	1.5	17.20	0.46	4
4	kesempatan kerja	17.66	1.5	17.20	0.46	5
5	pengangguran	17.66	1.5	8.10	9.56	1
6	pendapatan	17.66	1.5	17.39	0.27	7
7	bantuan modal	17.66	1.5	17.62	0.04	
8	pemberdayaan pertanian	17.66	1.5	17.65	0.01	
9	pemberdayaan perikanan	17.66	1.5	17.57	0.09	
10	pemberdayaan peternakan	17.66	1.5	17.56	0.1	
11	umkm	17.66	1.5	17.56	0.1	
12	hasil produksi	17.66	1.5	17.52	0.14	
13	penjualan hasil produksi	17.66	1.5	17.28	0.38	6
14	penduduk rentan	17.66	1.5	17.55	0.11	
15	jaminan kesehatan	17.66	1.5	17.56	0.1	
16	bantuan sosial	17.66	1.5	17.55	0.11	
17	air bersih	17.66	1.5	17.54	0.12	
18	rumah layak huni	17.66	1.5	17.56	0.1	
19	beban pengeluaran	17.66	1.5	17.59	0.07	
20	demotivasi	17.66	1.5	10.51	7.15	2
21	jaminan pendidikan	17.66	1.5	17.51	0.15	
22	investasi	17.66	1.5	17.54	0.12	
23	lapangan pekerjaan	17.66	1.5	17.54	0.12	

Langkah berikutnya adalah mendesain kebijakan dan menguji sistem dengan mekanisme simulasi perubahan yang potensial dilakukan. Pengujian ini kemudian dinilai dengan penilaian kualitatif. Langkah ini menentukan perilaku sistem yang dibuat daripada upaya prediksi semata.

A. Prioritas Target dan Intervensi Ketenagakerjaan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan menurunkannya tingkat pengangguran terbuka adalah:

1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat miskin
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin

B. Prioritas Target dan Intervensi Pemberdayaan (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
2. Menurunkan Beban Biaya Usaha
3. Stabilitas Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Penyediaan Perlindungan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan

C. Prioritas Target dan Intervensi Peningkatan UMKM

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Usaha Masyarakat Miskin (Usaha Mikro) adalah

1. Meningkatkan Skala Usaha Masyarakat Miskin
2. Peningkatan Wirausaha Baru Masyarakat Miskin

D. Prioritas Target dan Intervensi bantuan Sosial

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan pemenuhan bantuan sosial yang tepat dan akurat adalah

1. Keakuratan data kemiskinan;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

E. Prioritas Target dan Intervensi Pendidikan dan Kesehatan

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Menurunnya angka putus sekolah
2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidikan non formal
3. Menurunnya angka stunting
4. Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat

F. Prioritas Target dan Intervensi Kebencanaan

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana
2. Pemenuhan air pada kawasan kekeringan
3. Meningkatnya bantuan korban Bencana

G. Prioritas Target dan Intervensi Infrastruktur Dasar (Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni)

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas akses air minum layak di perdesaan
2. Meningkatnya kualitas sanitasi layak bagi masyarakat miskin
3. Menurunnya kawasan kumuh dan meningkatkakan akses masyarakat terhadap rumah layak huni

H. Prioritas Target dan Intervensi Konektivitas

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir
2. Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahan

I. Prioritas Target dan Intervensi Kemandirian Desa

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Bumdes
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan Desa

J. Prioritas Target dan Intervensi Ketahanan Keluarga

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

1. Menurunan angka pernikahan dini

Meningkatnya cakupan keluarga berencana

3.3.2 Analisis Strategi dan Kebijakan Tahun 2026

Hasil dari uji *leverage* ini menunjukkan ada enam elemen yang dapat menjadi *leverage* pada model berikut. Dari hasil uji sensitivitas bahwa yang paling memberikan dampak *leverage* yaitu:



Gambar pengaruh / leverage terhadap kemiskinan

Gambar tersebut menggambarkan faktor-faktor pengaruh (leverage) terhadap kemiskinan, yang terbagi menjadi enam aspek utama yang saling berkaitan dan memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor pertama ini mencakup tingkat pengangguran, kesempatan kerja, serta dominasi tenaga kerja di sektor informal. Rendahnya akses terhadap pekerjaan layak menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil dan berisiko memperburuk kemiskinan.

Kedua faktor demotivasi, Aspek ini menggambarkan menurunnya motivasi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) serta munculnya budaya mental kemiskinan, yaitu ketergantungan pada bantuan tanpa upaya peningkatan diri. Pernikahan pada usia muda berdampak pada putus sekolah, ketahanan keluarga yang lemah, stunting, perceraian, dan meningkatnya jumlah kepala rumah tangga perempuan. Semua kondisi ini memperbesar risiko kemiskinan antar generasi. Faktor keempat, Kemiskinan juga dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan dan masih adanya buta huruf di kalangan masyarakat miskin. Pendidikan yang rendah membatasi peluang kerja dan produktivitas.

Rendahnya harga jual produk dan minimnya nilai tambah pada hasil produksi masyarakat (seperti produk pertanian atau UMKM) menghambat peningkatan pendapatan, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketidaktepatan sasaran dalam program perlindungan sosial dan jaminan sosial membuat bantuan tidak efektif mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, jika tepat sasaran, bantuan sosial dapat menjadi leverage penting untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu dan lintas sektor, dengan fokus pada peningkatan kualitas manusia, kesempatan kerja, dan efektivitas kebijakan sosial.

Berikut merupakan analisis sasaran dan prioritas pada dokumen RPKD yang didukung dengan program afirmasi kepala daerah Kabupaten

Situbondo yang tercermin pada dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2025 – 2029. Ada 12 afirmasi prioritas yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menangani penanggulangan kemiskinan. afirmasi tersebut selanjutnya di skenarioakan menjadi aksi yang diterjemahkan pada bab 4 Rencana aksi.



Gambar tersebut menggambarkan sasaran penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2025–2029 beserta program afirmasi kepala daerah yang menjadi langkah konkret dalam mencapai target pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan, terdapat 12 sasaran utama yang disusun secara sistematis dari intervensi ekonomi, sosial, hingga infrastruktur dasar.

BAB IV

RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan jembatan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kegiatan, karena di dalamnya dijabarkan apa yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan, dengan sumber daya apa, dan bagaimana cara mengukurnya. Sementara Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat rangkaian program, kegiatan, target, indikator, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara terukur dan berkelanjutan. RAT kemiskinan berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), yang merupakan dokumen jangka menengah (5 tahun). RAT ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam sinkronisasi program lintas sektor yang menyentuh rumah tangga miskin secara langsung. Adapun Target Keberhasilan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Target Keberhasilan Kinerja Pada Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2026

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
- keterbatasan pilihan pelatihan yang tersedia - kurangnya minat kerja peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,43	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	68	91	159	720.500.000	1. menambah pilihan jenis pelatihan sesuai pasar kerja 2. melakukan pendampingan Rencana Tindak lanjut pasca pelatihan	Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Ketenagakerjaan
- belum semua lembaga pelatihan kerja terdaftar di OSS - belum siapnya lembaga pelatihan untuk melakukan akreditasi lembaga pelatihan	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,43	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	10	5	15	12.000.000	1. monitoring perizinan lembaga pelatihan kerja 2. melakukan pendampingan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Ketenagakerjaan
banyaknya perusahaan yang belum bersedia menerima tenaga kerja penyandang disabilitas	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,43	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	25	0	25	25.000.000	melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan perusahaan terkait penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Ketenagakerjaan
kurangnya minat dan pengetahuan pencari kerja terkait jenis jenis wirausaha	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,43	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	60	38	98	380.000.000	melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan bagi pencari kerja	Desa Juglangan, Kec. Panji dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Ketenagakerjaan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
					Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)							
Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban hubungan industrial secara normatif (pembuatan PP/PKB, pembentukan LKS Bipartit, pelaporan struktur skala upah) serta kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Hubungan Industrial (%)	100%	Penyelenggara Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	2	3	73.132.000	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan mengenai kewajiban penyusunan PP/PKB, pelaporan struktur skala upah, dan pembentukan LKS Bipartit. 2. Melaksanakan pendataan dan verifikasi perusahaan terkait kepatuhan hubungan industrial dan kepesertaan Jamsostek. 3. Fasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan secara berkala. 5. Penyusunan laporan hasil kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut.	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Ketenagakerjaan
Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya tepat sasaran	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PPM	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	1	1	76.464.000	Penyusunan RAT PK	Seluruh Kab. Situbondo	Bapperida

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya tepat sasaran	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PPM	100 %	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	0	1	89.692.728	Updating data kemiskinan	Seluruh Kab. Situbondo	Bapperida
1. Rendahnya Pendapatan Nelayan Kecil 2. Kurangnya Kesadaran Nelayan dalam Melestarikan Ekosistem	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20	20	40 Orang	75.000.000	Jasa Konsultasi terkait Penyusunan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan
3. Kurangnya pengetahuan didalam teknologi usaha Kelautan dan Perikanan 4. Rendahnya Akses Informasi Pasar dan Permodalan 5. Berkurangnya habitat ekosistem perairan umum daratan	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	3	6 Layanan	60.000.000	1. Pembinaan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan 2. Restocking Ikan dalam rangka Peningkatan Ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD)	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Petani masih belum mendapatkan kualitas bibit yang bagus 2. Mengganti sumber energi dari BBM ke tenaga listrik	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (Kopi dalam ton)	4.118	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	0	1 laporan	1 laporan	800.000.000	Pengembangan tanaman kemukus Mengembangkan tanaman kemukus pada daerah pegunungan dengan sistem tumpangsari dengan tanaman lainnya. Pengembangan	Desa Lamongan Kec. Arjasa dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
					Spesifik Lokasi					tanaman kopi		Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Penyediaan pompa air dan pemasangan listrik		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1. Produksi hortikultura masih bersifat titik yang menyebar 2. Akses ke pedagang masih terbatas 3. Kualitas hasilnya masih belum terkontrol	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (bawanh merah dan mangga dalam ton)	4.770 ton dan 62.137 ton	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0	1 laporan	1 laporan	1.593.578.187	-Fasilitasi Bibit Hortikultura -Fasilitasi dan pengembangan Maronggi/kelor untuk Ketahanan pangan -Pengembangan Mangga -Pengembangan Durian -Pengembangan Bawang Merah -Pengembangan Jahe	Kecamatan Kapongan, Sumber malang, Asembagus, Arjasa, Banyuputih, Panji, dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1. Banyak lahan kering/marginal yang kekurangan pasokan air 2. Banyaknya akses jalan ke lahan persawahan yang belum ada pengerasan sehingga mengganggu aksesabilitas 3. Banyaknya saluran irigasi yang sudah rusak	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tembakau dalam ton)	11.749	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0	1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000.000	Pembuatan sumur dangkal dan sumur dalam	Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Asembagus, Jangkar, dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	13 Unit	13 Unit	3.900.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kec. Jangkar, Panarukan, Arjasa, Situbondo, dan Sumber malang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
sehingga terjadi kebocoran disepanjang saluran air 4. Belum adanya prasarana penyimpanan tembakau untuk tunda jual				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0	14 Unit	14 Unit	3.100.000.000	Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sarana irigasi (tertier, kuartier) dan atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kec. Jangkar, Bungatan, Arjasa, Panji, Mlandingan, Panarukan, san Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Serangan hama dan penyakit semakin tinggi	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Meningkatkan penguatan Kelembagaan Petani	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali Persentase Petani yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilannya	100 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25	25	50 Hektar	116.135.821	Optimalisasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pelaksanaan gerakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerdal	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	0	2 Unit	434.859.788	Peningkatan Kapasitas Petani Milenial	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Peningkatan Kapasitas Petani Tembakau melalui sekolah lapang budidaya tembakau dan pasca panen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	0	17 Unit	255.425.320	-Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Verifikasi dan Validasi data penerima pupuk bersubsidi	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	0	5 Unit	77.346.700	Penyelenggaraan Sekolah Lapang PHT bagi komoditas strategis	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0	2 Dokumen	2 Dokumen	188.981.900	Fasilitasi legalitas bagi produk pertanian	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1. Pengawasan lalu lintas ternak yang belum optimal ditandai dengan penularan penyakit yang belum terkendali sepenuhnya 2. Kejadian penyakit hewan yang masih	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi peternakan: 1. Produksi Daging Sapi 2. Produksi Daging Kambing/Domba	0,40 0,30 0,40	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	Pemberdayaan ekonomi peternak melalui aktivitas jual beli yang aman, sehat dan berkualitas serta peningkatan mutu SDM petugas peternakan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
tinggi termasuk Penyakit Hewan Menular (PHM) 3. Kesadaran peternak akan pentingnya kesejahteraan dan kesehatan hewan yang masih rendah 4. Menjaga penjaminan mutu bahan pangan asal hewan yang berkualitas		3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	0,20 0,20	Penyakit Hewan Lainnya (HPM)								
1. Pengawasan lalu lintas ternak yang belum optimal ditandai dengan penularan penyakit yang belum terkendali sepenuhnya 2. Kejadian penyakit hewan yang masih tinggi termasuk Penyakit Hewan Menular (PHM) 3. Kesadaran peternak akan pentingnya kesejahteraan dan kesehatan hewan yang masih rendah 4. Menjaga penjaminan mutu bahan pangan asal hewan yang	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi peternakan: 1. Produksi Daging Sapi 2. Produksi Daging Kambing/Do mba 3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	0,40 0,30 0,40 0,20 0,20	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ko ta	0	1 Lapor an	1 Lapor an	25.000.000	Pemberdayaan ekonomi peternak melalui hewan/ternak yang sehat, bebas dari Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga terwujud kesejahteraan peternak maupun kesejahteraan hewan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Peternaka n dan Perikanan
	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi peternakan: 1. Produksi Daging Sapi 2. Produksi	0,40 0,30	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	1 Lapor an	1 Lapor an	15.000.000	Melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada petugas Puskesmas untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan hewan di	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Peternaka n dan Perikanan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
berkualitas 1. Adanya keluarga yang masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi anggota keluarga 2. Adanya fluktuasi harga pangan pada saat-saat tertentu (Nataru, bulan puasa dan lebaran)		Daging Kambing/Do mba 3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	0,40 0,20 0,20							Puskesmas		
	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi peternakan: 1. Produksi Daging Sapi 2. Produksi Daging Kambing/Do mba 3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	0,40 0,30 0,40 0,20 0,20	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan yang "Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)"	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	• Capaian angka kecukupan energi Capaian angka kecukupan protein	2.100 57	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	65 Keluarga	65 Keluarga	26.826.898	Pemanfaatan lahan pekarangan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
1. Adanya keluarga yang masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi anggota keluarga	Meningkatnya a diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Capaian angka kecukupan energi		Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	0	1 Doku men	1 Doku men	20.105.617	Gerakan pangan murah	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Adanya fluktuasi harga pangan pada saat-saat tertentu (Nataru, bulan puasa dan lebaran) Masih terdapat siswa dari keluarga tidak mampu yang belum terjangkau dalam mendapatkan bantuan Biaya Rentan Siswa Putus Sekolah Dasar	Meningkatnya a Jumlah Siswa Penerima Biaya siswa SD	Capaian angka kecukupan protein Jumlah Siswa Terancam Putus Sekolah SD	440	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Siswa Terancam Putus Sekolah SD	0	440	440	270.000.000	Melaksanakan pemberian bantuan pada siswa terancam putus sekolah SD	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Masih terdapat siswa dari keluarga tidak mampu yang belum terjangkau dalam mendapatkan bantuan Biaya Siswa Rentan Putus Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya a Jumlah Siswa Penerima Biaya siswa SMP	Jumlah Siswa Terancam Putus Sekolah SMP	330	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Siswa Terancam Putus Sekolah SMP	0	330	330	287.032.000	Melaksanakan pemberian bantuan pada siswa terancam putus sekolah SMP	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Masih terdapat Siswa yang masih dalam kategori Residu yaitu data Ganda dengan sekolah lain atau data tidak cocok dengan data dukcapil	Meningkatnya a Jumlah Lembaga penerima dana atau bantuan BOS pada sekolah tersebut	Jumlah Lembaga yang menerima dana BOS	542	Pengelolaan dana BOS (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)	Jumlah Lembaga Penerima BOS	271	271	542	66.170.160.000	Melaksanakan Verval dapodik lembaga	Sekolah SD dan SMP Kab. Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Masih Rendahnya masyarakat yang mengikuti program kesetaraan	Meningkatnya Jumlah Siswa yang mengikuti Program Kesetaraan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan Kesetaraan	1420	Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik Kesetaraan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan Kesetaraan	710	710	1420	1.484.955.730	Melakukan pemutakhiran data anak tidak sekolah untuk kembali kesekolah Pendidikan Kesetaraan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kurangnya ketrampilan pelaku usaha mikro agar produknya lebih inovatif dan bervariasi, serta kapasitas produksi yang masih rendah	Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Persentase Meningkatnya skala Usaha Mikro	1%	Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro melalui Pelatihan (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan)	Jumlah yang diberikan pelatihan	20	0	20	314.224.099	Pelatihan tata rias peningkatan SDM bagi usaha mikro rentan miskin	Desa Curah Cotok Kec. Panarukan, Desa Sumberkolak Kec. Panarukan, dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
Kurangnya ketrampilan pelaku usaha mikro agar produknya lebih inovatif dan bervariasi, serta kapasitas produksi yang masih rendah	Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Persentase Meningkatnya skala Usaha Mikro	1%	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah yang diberikan pelatihan	20	0	20	25.000.000	Pelatihan frozen food bagi usaha mikro rentan miskin	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
Kurangnya pengetahuan IKM dalam memahami strategi pemasaran	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan Sentra IKM	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Pengolahan Sentra IKM	0,05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	1	0	1	35.698.589	Pelatihan Pemasaran bagi IKM	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
modern, mengoptimalkan digital marketing, memperkuat branding, serta mengembangkan jaringan distribusi.				Industri dan Peran Serta Masyarakat	dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)							an
Terbatasnya sumberdaya untuk pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Warga negara yang menjadi Korban Bencana dan telah memperoleh layanan dan rehabilitasi akibat bencana (Pemulihan)	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2000	2000	4000	55.000.000	Pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi warga yang menjadi korban bencana sebagai bentuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Wilayah terdampak bencana	BPBD
Minimalnya pemuhan kebutuhan dasar	Warga negara yang menjadi Korban Bencana dan telah memperoleh layanan dan rehabilitasi akibat bencana (Pemulihan)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Distribusi Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	350	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	175	175	350	85.816.000	Pendistribusian logistik kepada korban bencana sebagai bentuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Wilayah terdampak bencana	BPBD

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Banyaknya lansia terlanter dan hidup sendiri belum mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar seperti permakanaan	Lansia terlanter dan / lansia hidup sendiri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	20	50.000.000	Pemenuhan permakanaan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi pada lansia sebanyak 2 kali dalam 1 hari selama 60 hari dengan klien eksisting penerima bantuan permakanaan tahun 2025 dengan tahapan sebagai berikut : 1. Tahapan Persiapan : Tahapan ini dilakukan dengan memastikan data eksisting sesuai dan memastikan apakah klien masih berhak menerima (klien tidak meninggal) serta mencari pengganti jika klien dinyatakan meninggal 2. Tahap Intervensi : Klien diberikan makanan siap saji sebanyak 2 kali sehari yang diantarkan petugas setiap pagi dan siang hari dengan ketentuan Rp. 30.000 per paket sudah termasuk ongkir dan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										biaya pengiriman oleh kurir. 3. Monitoring dilaksanakan setiap hari melalui link yang telah disiapkan dinas sosial yang wajib diisi oleh kurir berupa foto penyerahan makanan		
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Balita rentan miskin dan terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa seringkali tidak mendapatkan kebutuhan dasar sandang disebabkan karena dampak kemiskinan, kondisi lingkungan tidak mendukung dan minimnya akses terhadap kebutuhan dasar	PPKS Balita, Lansia Terlantar, Orang Terlantar dan Disabilitas	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	116	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	86	116	30.000.000	Kegiatan penyediaan sandang pakaian dasar bagi anak balita terlantar, ODGJ, dan kelengkapan peserta pelatihan keterampilan kerja dengan rincian sebagai berikut : 1. pemberian bantuan sandang berupa pakaian kepada balita miskin dan balita terlantar 2. Pemberian bantuan sandang berupa pakaian kepada Orang dengan Gangguan Jiwa sebanyak 30 orang sesuai dengan target tahun 2026 3. pemberian bantuan pemenuhan sandang bagi peserta pelatihan keterampilan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
PPKS Disabilitas belum mendapatkan akses bantuan alat bantu mobilitas dengan berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, kurangnya akses informasi dan edukasi, serta pengaruh stigma masyarakat	PPKS Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	15	15	45.000.000	Penyediaan alat bantu mobilitas bagi penyandang yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya, termasuk alat bantu aksesibilitas sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2020 yang dilakukan melalui : 1. pengajuan calon penerima manfaat alat bantu mobilitas yang dibuktikan surat permohonan bantuan alat bantu mobilitas yang dikeluarkan Desa/Kelurahan maupun laporan tertulis oleh pilar sosial 2. asesmen dan verifikasi dilakukan oleh Pekerja Sosial dan Pilar Sosial untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat 3. intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan disabilitas dibuktikan dengan berita acara serah teriam serta surat pernyataan 4. monitoring dilakukan dalam rangka apakah alat bantu yang	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										diberikan sesuai dan pengalihan alat bantu jika sudah tidak dibutuhkan dibuktikan dengan berita acara serah terima		
Kabupaten Situbondo berada di jalur strategis pantura sehingga banyak orang terlantar yang diberhentikan di wilayah Kabupaten Situbondo, Dinas Sosial Kabupaten situbondo adalah Kantor Dinas Sosial pertama setelah memasuki ruas jalan pantura dari pulau bali sehingga banyak PPKS yang malakukan transit di Situbondo.	PPKS Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas, Anak Terlantar dan Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	40	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	20	40	20.000.000	Pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Asesmen dilakukan oleh tenaga teknis bidang rehabilitasi sosial, yang bersumber dari surat permohonan pemulangan orang terlantar maupun laporan yang diberikan oleh pilar sosial atau desa dan keluarahan 2. intervensi dilakukan dengan memberikan surat keterangan orang terantar bagi orang terlantar, memberikan bantuan sosialisasi Rp.100.000 untuk OT yang berasal dari luar kota dan bantuan transportasi. jika orang klien berasal dari wilayah kabupaten situbondo maka akan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										diantarkan langsung ke alamat tujuan, jika klien dari wilayah provinsi jawa timur maka dinas sosial akan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, dan jika klien berasal dari luar wilayah provinsi jawa timur maka klien akan di rujuk ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 3. Terminasi layanan dikatakan selesai jika klien telah kembali ke keluarga maupun klien telah mendapatkan layanan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur		
masalah sosial pada tataran mikro seperti anak memerlukan perhatian khusus (AMPK) dan masalah mezzo seperti kasus bullying, kenakalan remaja, penggunaan napza dan pemasalahan lainnya masih banyak terjadi di kabupaten Situbondo utamanya pada lingkungan sekolah dan lingkungan rumah	PPKS	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	30	60	15.000.000	Pemberian bimbingan fisik (kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani), mental spiritual (kegiatan peningkatan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku), dan sosial (semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang bertujuan mengatasi masalah psikososial agar dapat	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										meningkatkan keberfungsian sosial). pemberian bimbingan sosial dilakukan oleh tenaga Psikolog Sosial dan Konselor Dinas Sosial. pemberian layanan didasarkan pada permintaan melalui surat lembaga maupun laporan masyarakat. layanan yang diberikan antara lain : 1. Bimbingan Sosial individu diberikan oleh psikolog sosial dengan melakukan asesemen sampai dengan hypnotherapy serta bimbingan sosial orang tua 2. Konseling Kelompok dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus yang membutuhkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah 3. Bimbingan Sosial kelas besar diberikan oleh psikolog sosial dan konselor sesuai dengan tematik permintaan lembaga		

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Banyak keluarga penyandang disabilitas berat tidak mengetahui pola perawatan yang baik bagi penyandang disabilitas berat sehingga perlu untuk diberikan pemahaman terkait perawatan bagi klien	Keluarga Penerima Bantuan Asistensi Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	0	50	25.000.000	Pemberian bimbingan sosial (semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang bertujuan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial), bimbingan sosial dilakukan dengan mendatangkan ahli seperti caregiver untuk memberikan pemahaman, pelatihan dan praktik langsung bagi orang tua dan keluarga terkait perawatan yang tepat bagi disabilitas. kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan ruang parenting yang lebih inklusif serta menjadi sarana dukungan psikologis antar orang tua klien disabilitas	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
kepemilikan identitas kependudukan adalah kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, pada praktiknya banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PPKS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk,	5	5	10	10.000.000	Fasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dilakukan melalui : 1. Perekaman biometrik	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
tidak memiliki identitas sehingga tidak dapat mengakses layanan sosial yang dibutuhkan. Disabilitas termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Tanpa Tempat Tinggal Tetap juga tidak memiliki adminduk. Selain itu layanan pengangkatan anak juga menemui masalah dimana banyak orang tua anak melakukan pengangkatan anak bukan dengan prosedur yang sah sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari		Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota			Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota					guna mengetahui identitas klien khususnya klien Psikotik Gelandangan 2. Fasilitasi pembuatan adminduk bagi PPKS yang dilakukan oleh pilar sosial guna mengkases layanan sosial seperti bantuan dan layanan rujukan 3. Layanan pendampingan adopsi anak		
Banyaknya PPKS Disabilitas usia sekolah yang tidak mendapatkan fasilitas belajar sesuai dengan kedisabilitasannya dan banyak PPKS terlantar Tanpa Tempat Tinggal	PPKS Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Kewenangan Kabupaten/	70	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	60	70	40.000.000	Pemberian akses ke Layanan Pendidikan (sekolah, literasi penyandang disabilitas netra) dan Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit), kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian alat belajar bagi siswa disabilitas	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Tetap tidak mendapatkan akses kesehatan dasar yang memadai.		Kota								Sekolah Luar Biasa di wilayah kabupaten sitobondo sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasannya , selain itu kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk pemberian rekomendasi PMKS dalam rangka pemberian akses kesehatan uang layak bagi PPKS tanpa identitas yang ditemukan di wilayah kabupaten situbondo		
Data layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum diolah dengan baik, tidak adanya layanan pengaduan bantuan sosial dan rehabilitasi sosial	PPKS	Jumlah Orang yang Mendapatka n Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	30	30	60	10.000.000	layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, layanan ini meliputi : 1. pengaduan permintaan layanan bimbingan sosial 2. pengaduan layanan rehabilitasi sosial 3. pengajuan bantuan sosial baik alat bantu mobilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, respon kasus, dan bantuan kewirausahaan disabilitas	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terkadang dilakukan di luar jam kerja dan membutuhkan tindakan segera seperti layanan rujukan rumah sakit bagi orang dengan gangguan jiwa, dan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS	PPKS	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	10	5	15	20.000.000	Pemberian pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera yang dilakukan tim rehabilitasi sosial termasuk layanan bimbingan sosial dan layanan pendampingan rumah sakit bagi PPKS dengan case tertetu	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
Banyak klien PPKS yang ditangani Dinas Sosial tidak diketahui alamat dan lokasi keluarga sehigga perlu untuk dilakukan tracking and tracing untuk mengatahui keberadaan keluarga untuk dilaksanakan reunifikasi keluarga	PPKS Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas, Anak Terlantar dan Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	35	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	20	15	35	15.000.000	Pemberian pelayanan penuluruhan keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga PPKS dengan prosedur sebagai berikut : 1. identifikasi awal dan asesemen yang dilakukan oleh tenaga teknis bidang rehabilitasi sosial guna mengumpulkan informasi keluarga klien 2. melakukan koordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial jika klien diindikasikan warga situbondo dan koordinasi dengan dinas sosial setempat jika klien diindikasikan bukan warga situbondo	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										3. melakukan fasilitasi pengembalian keluarga jika keluarga telah ditemukan		
Beberapa layanan Rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Situbondo karena terbatasnya akses dan kelengkapan layanan seperti layanan Rehabilitasi sosial lanjutan bagi ODGJ, layanan rehabilitasi sosial lanjutan bagi lansia terlantar.	PPKS Lansia Terlantar dan Disabilitas	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	20	50	30.000.000	Pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan. Layanan ini diberikan kepada PPKS dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder diantaranya : 1. UPT. RSBL Pasuruan untuk layanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut bagi PPKS Diabilitas ODGJ 2. UPT. PSTW Banyuwangi dan Bondowoso untuk layanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar 3. Balai PMKS Sidorajo untuk PPKS multilayanan layanan rujukan ini juga mencakup layanan shelter Dinas sosial sebagai layanan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										rehabilitasi sosial dasar dan transit bagi PPKS sebelum dilakukan rujukan.		
Banyaknya PPKS yang belum mendapatkan akses pemenuhan pernekal kesehatan seperti ketersediaan obat-obatan bagi PPKS yang ada di shelter maupun dalam masa perawatan, dan kurangnya pemenuhan gizi pada balita yang berasal dari keluarga miskin	PPKS Balita dan PPKS Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	66	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30	36	66	25.000.000	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis yang diberikan dalam bentuk bantuan pemenuhan gizi dasar bagi balita miskin dan terkatar serta bantuan obat-obatan bagi klien PPKS	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
masih ada keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan	Keluarga Miskin	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	170	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	80	90	170	98.000.000	Memberikan Bantuan Paket Sembako Kepada Keluarga Miskin	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
		Kabupaten/ Kota			Kabupaten/Ko ta							
masih terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi rial di lapangan	Usulan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	6	6	12	40.000.000	Memperbaiki dan Update Pengelolaan Data Fakir Miskin	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
Pemenuhan kebutuhan dasar hanya cukup 1 hari	Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	550	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	250	550	165.000.000	Memberikan Bantuan Paket Sembako Kepada Korban Bencana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
terbatasnya jumlah paket bantuan sandang tersedia	Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan	33	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	20	23	43	25.000.000	Memberikan Bantuan Paket Sandang Kepada Korban Bencana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
		n Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							
terbatasnya jumlah paket untuk kelompok rentan	Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	23	23	36	13.000.000	Memberikan Bantuan Kepada Kelompok rentan Korban Bencana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
tingginya pontensi trauma pasca kejadian bencana	Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	61	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	31	61	5.000.000	Memberikan Psikososial Kepada Korban Bencana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
kurangnya tempat pengungsian bagi korban bencana	Korban Bencana	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	14	14	28	5.000.000	Memberikan bantuan di tempat pengungsian	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
masih ada beberapa daerah rawan bencana yang belum terbentuk kampung siaga bencana	Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakn Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	1	1	23.000.000	Sosialisasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
Minimnya masyarakat pengetahuan masyarakat pada tanggap darurat	Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakn Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	61	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	61	0	61	55.000.000	Taruna Siaga Bencana yang melakukan Penanganan Bencana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Minimnya program peningkatan kemandirian ekonomi bagi aktor penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	10 Orang	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	10	0	10 Orang	26.000.000	Penguatan kewirausahaan dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi senilai Rp 1.500.000/orang. Tahapan rencana kegiatan meliputi : 1) Perencanaan merupakan penentuan jenis PSKS yang akan mendapat program, asesmen kebutuhan dan potensi sasaran, pembuatan proposal 2)Intervensi merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan, yaitu berupa penguatan keterampilan wirausaha dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi senilai Rp 1.500.000/orang yang akan dimanfaatkan berdasarkan proposal yang diajukan 3)Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap keberlanjutan penerima program setelah pemberian keterampilan dan bantuan pengembangan ekonomi	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										4)Evaluasi merupakan tahapan pengukuran pencapaian keberhasilan atau kegagalan program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial		
Ketergantungan terhadap bantuan sosial bagi masyarakat yang produktif menyebabkan beberapa dampak seperti melemahnya kemandirian, memperkuat akar kemiskinan, menimbulkan potensi keresahan sosial apabila bantuan sosial tiba-tiba diberhentikan atau dikurangi. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan kemiskinan perlu skema program untuk mengurangi ketergantungan tersebut yang secara bertahap menghubungkannya dengan program pengembangan usaha dan pelatihan agar penerima dapat	PPKS (Fakir Miskin)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	65 Orang	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	25	40	65 Orang	106.000.000	Pemberian bantuan modal usaha bagi PPKS yang memiliki keinginan berwirausaha tetapi sumber daya terbatas senilai Rp 1.500.000/orang. Tahapan rencana kegiatan meliputi : 1) Perencanaan merupakan tahapan penentuan sasaran kegiatan,asesmen kebutuhan dan potensi sasaran serta pendampingan pembuatan proposal 2)Intervensi merupakan pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha senilai Rp 1.500.000/orang dan pendampingan dalam pemanfaatan modal usaha yang disesuaikan dengan proposal yang telah diajukan 3)Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
mandiri. Salah satu skema program tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat agar penerima program mandiri dan berdaya secara ekonomi										keberlanjutan penerima program 4)Evaluasi merupakan tahapan pengukuran pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pemanfaatan program bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial		
Lemahnya kualitas basis data akan menyebabkan ketidakvalidan data sehingga data yang tersedia tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada masyarakat sehingga menyebabkan program-program tidak tepat sasaran.	Operator SIKS NG Desa/ Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin yang Didata	136 Orang	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Didata	136	136	136 Orang	90.800.000	Kegiatan ini meliputi : 1) Penguatan kapasitas kepada operator SIKS NG baik secara daring maupun luring dalam update DTSEN; 2) Monev kepada operator SIKS NG secara langsung dan berkala diutamakan bagi operator SIKS NG yang pasif; 3) Pemberian Bantuan Transport bagi Operator SIKS NG sebesar Rp 300.000,-	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial
Minimnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang melibatkan PPKS yang berperan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, sehingga peran mereka dalam menangani permasalahan PMKS kurang signifikan	Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Karang Taruna	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	2 Lembaga	32.000.000	Kegiatan ini meliputi : 1) Sosialisasi mengenai Permensos terbaru tentang cara mendaftarkan LKS baru maupun memperpanjang ijin LKS yang telah beroperasi 2)Reformasi Forum Karang Taruna Kabupaten Situbondo yang telah berakhir	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Sosial

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										masa jabatannya, agar memberikan penyegaran dalam pergerakan Karang Taruna di Kab. Situbondo		
Masih kurangnya Pendapatan Perempuan dalam keluarga	Perempuan kepala keluarga miskin yang dilatih	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	28,45 %	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	226	226	452 orang	188.082.229	Pelatihan Digital Marketing	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas DP3AP2KB
Masih adanya usia pernikahan anak	calon pengantin (catin) usia anak	Jumlah angka pernikahan usia anak	250	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2	1	3 lembaga	23.181.769	Memberikan konseling dan rekomendasi pada calon pengantin usia anak	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas DP3AP2KB
minimnya keterlibatan masyarakat terutama yang	meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan	jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1 laporan	92.000.000	Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan POKDARWIS dan SDM	Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
masuk kategori miskin dalam pengelolaan wisata di desa atau desa wisata dikarenakan minimnya keahlian dan kapasitas dalam dunia kepariwisataan	kepariwisataan khususnya bagi masyarakat miskin			Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					kepariwisataan	dan Seluruh Kab. Situbondo	Olahraga
masih banyaknya angka pengangguran usia muda di Kabupaten Situbondo, sehingga perlu adanya dorongan untuk memberikan stimulan berupa pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda khususnya yang masuk dalam kategori keluarga miskin	meningkatkan kewirausahaan pemuda bagi keluarga miskin	jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan	1 kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	0	50	50 orang	100.950.000	Pelaksanaan Pelatihan Kepemudaan khususnya wirausaha pemula (pelatihan pembuatan kuliner khas daerah/ pelatihan kriya)	Desa Dawuan Kec. Suboh dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
Kurangnya Pemberdayaan dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif bagi keluarga miskin	Jumlah Kegiatan Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Kegiatan	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	5	5 Lembaga	50.000.000	Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan/Asosiasi Ekonomi Kreatif yang menyasar Keluarga Miskin	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Kurangnya Pemberdayaan dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif bagi Keluarga Miskin Masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan akses untuk pulang kampung saat hari raya, Tingginya resiko kecelakaan pemudik yang menggunakan motor	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif bagi keluarga miskin Masyarakat berpenghasilan rendah (pekerja informal, buruh, pedagang kecil, mahasiswa, perantau, dll)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah peserta mudik yang difasilitasi	2 Kegiatan orang	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	0	1	1 kegiatan	50.000.000	Fasilitas Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Keluarga Miskin	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Indeks Keselamatan Lalu Lintas, Presentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart, Presentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum sesuai standart	250	0	250	20.000.000	Penyediaan Angkutan gratis yang layak jalan dan sesuai standar, Identifikasi dan pemetaan calon peserta mudik gratis, Koordinasi dengan propinsi untuk sosialisasi program dan mekanisme pendaftaran peserta, Koordinasi lintas sektor untuk pengamanan kegiatan, Sosialisasi mekanisme pendaftaran, Survey kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan mudik gratis	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Perhubungan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Memberikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh dan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan yang ada di kawasan kumuh	Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase luas kawasan kumuh yang belum tertangani Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	0	1	1	400.000.000	Melakukan Rehabilitasi Saluran Drainase di Kawasan Kumuh, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan	Desa Alasmalang Kec. Panarukan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
Permasalahan kemiskinan yang bisa dikerjakan oleh DPUPP melalui sub indikator di samping			53,09 %	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	1	1	100.000.000		Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
Adanya kebutuhan layanan irigasi yang mencukupi agar tingkat produktivitas hasil pertanian meningkat			60,33 %	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0	0,5	0,5	800.000.000	-	Desa Kendit Kec. Kendit, Desa Suboh Kec. Suboh, Desa Asembagus Kec. Asembagus, Desa Gunung Malang Kec. suboh, Desa Jetis Kec.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
											Besuki	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0	1,68	1,68	100.000.000	Rehabilitasi Tangkis kiri dam kamar Selomukti	Desa Kalianget Kec. Banyuglugur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	3,5	3,5	446.200.000	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3 UPT	Desa Curah Jeru Kec. Panji dan Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	0	1	1	875.000.000	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Sumur Bor Dangkal Desa Talempong Kec.Banyuglugur	Desa Kedung Dowo Kec. Arjasa, Desa Kedunglo Kec. Aembagus, Desa Suboh Kec. Suboh, Desa Talempong Kec. Banyuglugur, Desa Bantal Kec. Asembagus, Desa Kotakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
											Kec. Situbondo	
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0	1	1	29.900.000	Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi Kabupaten	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
Adanya penduduk miskin yang belum memiliki akses air minum secara layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakarya an	Persentase akses air minum layak perpipaan	72,79 %	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	0,08	0,08	1.297.500.000	1. Peningkatan SPAM JP Mata Air Dusun Pacaron, Desa Klatakan	Desa Klatakan dan Tambak Ukir Kec. Kendit, Desa Sumberkolak Kec. Pamarukan, Desa Kembang Sari Kec. Jatibanteng, Desa Selobanteng dan Lubawang Kec. Banyuglugur, Desa Pesisir Kec. Besuki	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	2	3	188.872.028	1. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana SPAM	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	78	78	200.000.000	1. Perluasan SPAM JP Bor Tegal Barat, Desa Wringin Anom 2. Perluasan SPAM JP Bor Galingan, Dusun Plasaan, Desa Sopet	Desa Sumberrejo Kec. Banyuputih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	20	10	30	80.000.000	1. Pembinaan Penyelenggara SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pemenuhan gizi, PHBS, persiapan berkeluarga dan 1000 HPK sehingga rentan stunting	Tim Pendamping Keluarga	Jumlah keluarga berisiko stunting yang didampingi	33329 keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal	0	10	10 laporan	2.221.800.000	Mendampingi keluarga berisiko stunting melalui identifikasi faktor risiko, pemberian KIE, layanan kesehatan, dan layanan pendukung lainnya. Mendampingi calon pengantin/caPUS (minimal 2 pasangan dalam 3 bulan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas DP3AP2KB

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
				Baduta/Balita)	on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					pranikah) serta mendorong pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Mendampingi semua ibu hamil (8 kali dalam 1 tahun) melalui pemantauan kehamilan, KIE, dan fasilitasi rujukan. Mendampingi ibu pasca salin, pasca keguguran, dan yang memiliki balita (0-59 bulan) minimal 2 kali dalam setahun. Melakukan pengamatan, deteksi dini faktor risiko, monitoring, evaluasi, dan perbaikan kondisi keluarga berisiko stunting. Memastikan keluarga memperoleh serta memanfaatkan bantuan sosial secara tepat.		
	Terwujudnya Publikasi Data Statistik yang optimal	Persentase Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	100%	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia (Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia)	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	6	6	12 Dokumen	29.596.460	Penyusunan Roadmap Statistik Kemiskinan	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
	Terwujudnya Publikasi Data Statistik yang optimal Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan Persentase Informasi yang disebarluaskan Kepada Publik	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoran yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia Pelayanan Informasi Publik (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Publik	6	6	12 Doku men 12 Doku men	15.000.000	1 Penguatan Kelembagaan Melalui Pembangunan Regulasi Statistik Sektoral 2 Penyediaan Data Statistik Sektoral Daerah Sebagai Dasar Perencanaan Pengentasan Kemiskinan 3 Penyediaan Pelayanan Informasi Publik	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika
			71%	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6	6	12 Doku men	100.000.000	Penyebarluasan Informasi Mengenai Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Media Komunikasi Publik	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika
Adanya jenis usaha yang sama	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pendapatan keluarga Penerima Manfaat	Persentase Meningkatnya Pendapatan Keluarga	100%	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	0	136	136	3.136.675.000	Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada KPM dan Pelaku di Desa	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
				Hukum Adat	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
Pengurus BUMDes sulit menentukan jenis usaha sesuai dengan potensi desa yang ada, Manajemen BUMDes yang lemah sehingga tidak dapat mengukur sejauh mana usaha bumdes berjalan	Meningkatnya pengembangan usaha Bumdes yang aktif, berbadan hukum dan memiliki klasifikasi berkembang atau maju dan berkelanjutan	Jumlah BUMDes Bumdes yang aktif, berbadan hukum dan memiliki klasifikasi berkembang atau maju	7 BUMDES	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0	1	1 Dokumen	86.492.643	Melakukan pelatihan, bimtek, monev, rapat koordinasi	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Desa sulit menentukan potensi desa yang ada	Meningkatkan desa wisata dan ketahanan pangan	Jumlah desa yang telah mandiri terhadap pengelolaan wisata dan ketahanan pangannya	3 Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	1	1 Dokumen	129.537.609	Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Masih rendahnya kepemilikan akte kematian	Meningkatnya Kepemilikan Akte Kematian	Persentase akte kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-	6	5	11	13.500.000	Melakukan kerjasama dengan perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga	Prosentase capaian SPM Bidang Pelayanan kesehatan keluarga (%)	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	3220	3220	6440	27.490.980	Melakukan Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
Banyak ibu bersalin yang pindah lokasi tempat tinggal sehingga pencatatan menjadi tidak sinkron dengan jumlah ibu hamil				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3958	3958	7916	21.069.800	Melakukan Pelacakan Kasus Nearmiss	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
adanya bayi yang premature dan abortus dimana bayi baru blm waktunya				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3857	3857	7714	1.069.205.000	Melakukan Orientasi Program Kesehatan Bayi melalui Skrining dan Intervensi BBL	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
SDMK diperlukan adanya peningkatan kompetensi dikarenakan protipe / DO penanganan balita selalu ada pembaruan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16390	16390	32780	15.976.000	Melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PKAT (Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi)	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar (7-15 tahun) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	40050	40050	80100	48.178.016	Melakukan Rapat Koordinasi TP. UKS/M Kabupaten	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan

[illegible]

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
		Prosentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani sesuai standart (%)	100									Dinas Kesehatan
belum terbringingnya data di Aplikasi CKG dan E-pus sehingga mengakibatkan data tidak cocok				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	2497 4	1665 1	41.62 5	25.000.000	Melakukan Pelayanan bagi penderita hipertensi sesuai tata laksana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
belum terbringingnya data di Aplikasi CKG dan E-pus sehingga mengakibatkan data tidak cocok				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	6193	4130	10.32 3	30.719.000	Melakukan Pelayanan bagi penderita hipertensi sesuai tata laksana	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standar	800	534	1.334 orang	40.000.000	Melakukan Penanganan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilayani sesuai standar	4040	4040	8.080 Orang	1.453.619.633	Melakukan Pelayanan Orang dengan terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif												
dikarenakan DO untuk menghitung orang dengan resiko HIV adalah ibu hamil, populasi kunci dan orang dengan TB, tetpai apabila tidak menemukan ibu hamil dan orang dengan TB sedikit maka capaian HIV akan ikut sedikit				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang yang berisiko tertular HIV yang dites HIV	5746	5746	11.49 2 orang	98.970.000	Melakukan Pelayanan orang beresiko tertular virus HIV yang mendapatkan pelayanan Skrining Sesuai standart	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
masih banyaknya masyarakat yang belum tahu program kesehatan (soca terak, ambugellu dan khitanan) selain itu musim yang tidk menentu juga sering mengalami KLB demam berdarah.				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	6	6	12 doku men	838.510.079	Melakukan pelayanan Skrining dan penanganan gangguan indera pada masyarakat,	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
										Melakukan Baksos Operasi Katarak "Soca Terak",		Dinas Kesehatan
										Melakukan Khitanan Massal,		Dinas Kesehatan
										Melakukan Keg Ambugellu di 4 titik (3		Dinas Kesehatan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										alun alun dan di lokasi yang ada keg UMKM)		
										Melakukan penyemprotan sarang nyamuk dan Bimtek untuk kegiatan penyakit menular (Kusta , HISP dan Zoonosis)		Dinas Kesehatan
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting)	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat	Prosentase Bumil KEK (%)	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	kegiatan masuk ke puskesmas	6	6	12 dokumen	215.368.471		Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) (%)	7,5		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)					Melakukan pemberian PMT Pemulihan		Dinas Kesehatan
Masih kurangnya sadarnya masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan sehingga enggan mendaftar sebagai peserta JKN selain itu Dinas Kesehatan juga kurang anggaran apabila mencakup semua peserta JKN	Meningkatnya Sarana Prasarana Fasyankes & Jaminan Pembiayaan	Prosentase UHC (%)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang premi jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah daerah	49%	49%	98% penduduk	56.670.000.000	Melakukan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah daerah	Seluruh Kab. Situbondo	Dinas Kesehatan
					Jumlah Kasus yang pelayanannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan	50%	50%	100%		Melakukan Pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan		Dinas Kesehatan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45	45	90	93.850.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Wonorejo
		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	6	6	12	169.224.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Wonorejo
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Wonorejo
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Wonorejo
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Wonorejo
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Wonorejo

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275	275	550	87.525.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Banyuputih
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4028	4027	8.055	32.700.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Banyuputih
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47	48	95	4.375.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Banyuputih
masih banyaknya petugas kesehatan yang mengampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	340	339	679	13.750.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Banyuputih

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
positif												
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	213.257.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Banyuputih	Puskesmas Banyuputih
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Banyuputih
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Banyuputih
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Banyuputih
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Banyuputih

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227	227	454	115.350.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Asembagus	Puskesmas Asembagus
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2872	2872	5.744	33.000.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Asembagus	Puskesmas Asembagus
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50	49	99	6.250.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Asembagus	Puskesmas Asembagus
masih banyaknya petugas kesehatan yang mengampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	347	346	693	16.514.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Asembagus	Puskesmas Asembagus

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
positif												
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6	6	12	248.906.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Asembagus	Puskesmas Asembagus
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Asembagus
masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6	6	12	118.175.000	Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	Kecamatan Asembagus	Puskesmas Asembagus

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan										Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Asembagus

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Asembagus
										Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Asembagus
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290	290	580	136.000.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Jangkar	Puskesmas Jangkar
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1633	1632	3.265	14.550.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Jangkar	Puskesmas Jangkar

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40	40	80	10.800.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Jangkar	Puskesmas Jangkar
masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	270	270	540	13.500.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Jangkar	Puskesmas Jangkar
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	218.273.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Jangkar	Puskesmas Jangkar
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Jangkar

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Jangkar
										Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Jangkar
										Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Jangkar
										Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Jangkar
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	212.986.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Arjasa	Puskesmas Arjasa
		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	90							Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Arjasa

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Arjasa
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Arjasa
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Arjasa
masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	2	85.297.000	Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	Kecamatan Arjasa	Puskesmas Arjasa

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Arjasa
										Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Arjasa
										Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Arjasa
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	93,29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	187.761.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Kapongan	Puskesmas Kapongan
		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100							Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Kapongan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Kapongan
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Kapongan
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Kapongan
masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	1	71.200.000	Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	Kecamatan Kapongan	Puskesmas Kapongan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Kapongan
										Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Kapongan
										Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Kapongan
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166	165	331	104.200.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Panji	Puskesmas Klampokan
masih banyaknya petugas kesehatan yang mengganggalkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	105	106	211	17.600.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Panji	Puskesmas Klampokan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	181.773.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Panji	Puskesmas Klampokan
										Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Klampokan
										Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Klampokan
										Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Klampokan
										Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Klampokan
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329	329	658	109.390.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Panji	Puskesmas Panji

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	98,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4411	4412	8.823	40.200.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Panji	Puskesmas Panji
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54	55	109	6.250.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Panji	Puskesmas Panji
masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	386	387	773	15.375.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Panji	Puskesmas Panji

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	1	1	215.693.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Panji	Puskesmas Panji
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Panji
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Panji
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Panji
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Panji
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203	203	406	101.150.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Mangaran	Puskesmas Mangaran

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	1	1	191.170.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Mangaran	Puskesmas Mangaran
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Mangaran
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Mangaran
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Mangaran
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Mangaran
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	97,9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	381	382	763	91.500.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Panarukan	Puskesmas Panarukan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2474	2474	4.948	34.700.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Panarukan	Puskesmas Panarukan
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54	55	109	6.325.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Panarukan	Puskesmas Panarukan
masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	385	384	769	9.375.000	Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Panarukan	Puskesmas Panarukan
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1	0	1	175.432.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Panarukan	Puskesmas Panarukan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
					Masyarakat							
										Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Panarukan
										Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Panarukan
										Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Panarukan
										Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Panarukan
masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	1	56.425.000	Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	Kecamatan Panarukan	Puskesmas Panarukan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan												
										Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Pantarukan
										Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Pantarukan
										Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Pantarukan
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	97,7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156	156	312	73.450.000	Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Kendit	Puskesmas Kendit
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1339	1338	2.677	12.550.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Kendit	Puskesmas Kendit

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
					Standar							
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	169.615.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Kendit	Puskesmas Kendit
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Kendit
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Kendit
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Kendit
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Kendit

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166	166	332	64.900.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Bungatan	Puskesmas Bungatan
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174	175	349	26.550.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Bungatan	Puskesmas Bungatan
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37	36	73	7.500.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Bungatan	Puskesmas Bungatan
masih banyaknya petugas kesehatan yang mengampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	134	134	268	14.300.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Bungatan	Puskesmas Bungatan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
positif												
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	180.222.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Bungatan	Puskesmas Bungatan
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Bungatan
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Bungatan
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Bungatan
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Bungatan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156	157	313	78.960.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Mlandingan	Puskesmas Mlandingan
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1060	1060	2.120	33.000.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Mlandingan	Puskesmas Mlandingan
masih banyaknya petugas kesehatan yang mengganggalkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	167	167	334	19.600.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Mlandingan	Puskesmas Mlandingan
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2	2	4	169.999.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Mlandingan	Puskesmas Mlandingan

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Mlandingan
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Mlandingan
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Mlandingan
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168	168	336	95.800.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Suboh	Puskesmas Suboh
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1662	1662	3.324	28.050.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Suboh	Puskesmas Suboh

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	157.106.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Suboh	Puskesmas Suboh
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Suboh
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Suboh
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Suboh
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Suboh
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1322	1322	2.644	32.450.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum	Kecamatan Besuki	Puskesmas Besuki

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
					Sesuai Standar					TTD		
masih banyaknya petugas kesehatan yang mengampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293	293	586	16.000.000	Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Kecamatan Besuki	Puskesmas Besuki
masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	1	70.828.000	Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	Kecamatan Besuki	Puskesmas Besuki
										Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi		Puskesmas Besuki

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular		Puskesmas Besuki
										Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta		Puskesmas Besuki
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	96,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148	147	295	99.000.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Besuki	Puskesmas Widoropayung
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1313	1313	2.626	22.200.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Besuki	Puskesmas Widoropayung
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21	20	41	15.750.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Besuki	Puskesmas Widoropayung

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135	135	270	73.665.000	Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21	20	41	11.800.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	193.908.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Jatibanteng
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Jatibanteng

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Jatibanten g
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Jatibanten g
belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1177	1178	2.355	26.400.000	Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	Kecamatan Sumbermalan g	Puskesmas Sumbermalan g
belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56	57	113	12.150.000	Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Kecamatan Sumbermalan g	Puskesmas Sumbermalan g

Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator	Target			Pagu Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Lokasi Fokus (Prioritas)	Pelaksana
						Smt 1	Smt 2	Total				
Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6	Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas	Capaian Nilai SPM (%)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177	177	354	80.413.000	Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	Kecamatan Sumbermalang	Puskesmas Banyuglugur
Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan		Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%)	97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	1	153.503.000	Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Kecamatan Banyuglugur	Puskesmas Banyuglugur
										Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk		Puskesmas Banyuglugur
										Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK		Puskesmas Banyuglugur
										Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		Puskesmas Banyuglugur
										Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal		Puskesmas Banyuglugur

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, maka dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2026 merupakan sebuah strategi dan pedoman serta tools bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakselerasi pencapaian indikator kinerja utama yakni kemiskinan yang ditargetkan.

Selanjutnya, untuk penyusunan program dan kegiatan serta rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen RAT Kemiskinan Kabupaten Situbondo, telah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam merespon harapan masyarakat. Dalam implementasi program dan kegiatan serta rencana aksi komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan yang dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan berbasis digital serta berdampak. Selain itu juga diperlukan adanya sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO